

**PELAKSANAAN PASAL 7 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53
TAHUN 2010 TENTANG KEDISIPLINAN APARATUR SIPIL NEGARA
MENURUT FIQH SIYASAH (Penelitian di Kantor Rektorat Universitas
Islam
Negeri Raden Intan Lampung)**



Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

KURNIA SULISTYA ZAHRA

NPM : 1421020187

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1440 H / 2019 M

**PELAKSANAAN PASAL 7 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53
TAHUN 2010 TENTANG KEDISIPLINAN APARATUR SIPIL NEGARA
MENURUT FIQH SIYASAH
(Penelitian di Kantor Rektorat Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung).**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh:

KURNIA SULISTYA ZAHRA

NPM : 1421020187

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah syar'iyah)

Pembimbing I : Drs. Susiadi, M.Sos.I

Pembimbing II : Eti Karini. S.H.,M.Hum.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

ABSTRAK

Aparatur Sipil Negara (disingkat ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah (Tenaga Kontrak). Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Disiplin merupakan sikap mental yang tecermin dalam perbuatan tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan, ketentuan, etika, norma dan kaidah yang berlaku. Disiplin kerja adalah sikap kejiwaan seseorang atau kelompok yang senantiasa berkehendak untuk mengikuti atau mematuhi segala peraturan yang telah ditentukan. Kedisiplinan dapat dilakukan dengan latihan antara lain dengan bekerja menghargai waktu dan biaya akan memberikan pengaruh yang positif terhadap produktivitas kerja pegawai. Kedisiplinan pegawai adalah sikap penuh kerelaan dalam mematuhi semua aturan dan norma yang ada dalam menjalankan tugasnya sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap pekerjaannya.

Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan diantaranya, Bagaimana pelaksanaan kedisiplinan dan sanksi pegawai ASN di Kantor Rektorat. Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap kedisiplinan pegawai ASN. Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Peraturan Pemerintah tentang Kedisiplinan ASN sudah sesuai dengan apa yang telah di terapkan di Kantor Rektorat UIN Raden Intan Lampung dan untuk mengetahui bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Proses pengumpulan data dalam penelitian, menggunakan metode pengumpulan data, observasi, dan wawancara. Dalam menganalisis, penelitian menggunakan analisa kualitatif dan dibantu dengan menggunakan teori yang bersangkutan dengan permasalahan skripsi ini.

Adapun kesimpulan Namun pada kenyataannya peraturan tersebut belum optimal dilaksanakan karena masih ada beberapa Aparatur Sipil Negara di Kantor Rektorat UIN Raden Intan Lampung yang masih melakukan pelanggaran disiplin. ASN di Lingkungan Kepegawaian Kantor Rektorat UIN Raden Intan Lampung memiliki peran besar dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya dalam meningkatkan disiplin pegawai terhadap jam kerja. Kurang maksimalnya sanksi yang diberikan pegawai dan kurang sadarnya pegawai dalam sanksi yang diberikan tersebut, sehingga kepala Kasubag Di Kantor UIN Raden Intan Lampung memberikan toleransi dan sanksi Ringan Kepada pegawai ASN tersebut.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. 0721 703260


PERSETUJUAN

Nama : Kurnia Sulistya Zahra
NPM : 1421020187
Jurusan : Siyasah Syar' iyyah
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara Menurut Fiqh Siyasah (Penelitian Di Kantor Rektorat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Syari'ah Raden Intan Lampung.


Pembimbing I


Drs. Susiadi, M.Sos.I
NIP. 197501292000031001

Pembimbing II


Eti Karini, SH., M.Hum.
NIP.197308162003122003

Ketua Jurusan Siyasah


Drs. Susiadi, M.Sos.I
NIP. 197501292000031001



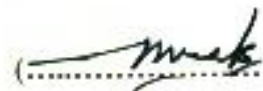
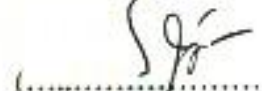
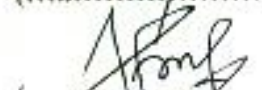

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara Menurut Fiqh Siyasah (Penelitian Di Kantor Rektorat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)"**, disusun oleh Nama: Kurnia Sulistya Zahra NPM: 1421020187, Program Studi : Siyasah syar' iyyah. Telah diajukan dalam sidang Munasqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. H. M. Said Jamhari, M.Kom.I.	()
Sekretaris	: Helma Maraliza, S.E.I., M.E.I.	()
Penguji I	: Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.I	()
Penguji II	: Drs. Susiadi, M.Sos.I	()

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Raden Intan Lampung



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat¹ (Q.s An-nisaa ayat 58)



¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: yayasan penyelenggara penterjemah al-qur'an, 1971).h.128

PERSEMBAHAN

Alhadulillahirabbil'alamin, dengan rasa syukur kepada Allah SWT, ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Bapak Surya Darma dan Ibu Sri Sumarni tercinta yang telah ikhlas dan sabar membesarkan, mendidik dan selalu men'doakanku.
2. Kepada adik-adik ku yang selalu menyemangatiku M. Haiqal Surya Ramadhan dan Muhammad Rafiif Surya Abdika dan sepupuku Sella Pratiwi, Selli Pratiwi, Khoirun Nisa, Atika Sulistia Saputri, Chinka Sulistinaky, yang selalu membantu dan mendoakan untuk kelulusan ku.
3. Teman-teman angkatan 14 Siyasah syar'iyah C yang selalu memberi semangat, dukungan dan bantuan kepadaku dan Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Kurnia Sulistya Zahra, seorang anak yang dilahirkan di Bandar Lampung, tepatnya pada tanggal 13 Mei 1996 yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan bapak M. Surya Darma dan ibu Sri Sumarni.

Pendidikan dimulai dari taman kanak-kanak (TK) Aisyiyah 2 Kedaton Bandar Lampung, lulus pada tahun 2001. Sekolah Dasar (SDN) 2 Surabaya Kedaton Bandar Lampung. Sekolah lanjut tingkat pertama (SLTP) di SMPN 12 Bandar Lampung lulus pada tahun 2011. Sekolah lanjut tingkat atas (SLTA) SMAN 13 Bandar Lampung lulus pada tahun 2014. Terdaftar sebagai mahasiswa di jurusan Siyash Syar'iyah Fakultas Syar'iah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PASAL 7 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG KEDISIPLINAN APARATUR SIPIL NEGARA MENURUT FIQH SIYASAH (Penelitian di Kantor Rektorat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).”**. Shalawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarga, Sahabat dan Umatnya.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Siyasah syar’iyyah, Fakultas Syari’ah Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
2. Drs. Susiadi, M.Sos.I, selaku Ketua Jurusan Siyasah syar’iyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

3. Frengki, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Siyasah Syar'iyah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran selama penyusunan skripsi ini.
4. Drs. Susiadi, M.Sos.I., selaku Pembimbing I yang telah membimbing penulis sejak awal perkuliahan dan banyak memotivasi serta meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Eti Karini. SH.,M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis sejak awal perkuliahan dan banyak memotivasi serta meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen jurusan siyasah syar'iyah yang telah memberiku ilmu yang bermanfaat.
7. Sahabat-sahabat ku Peni Fitri Yanti S.H, Andika Wanda Yanti S.H, Selfi Merliani, Feby Rahma Almaini, Parizon, Syaipudin, Bagus Prido Zaini, Marsiliyansyah, Wahyu Saman Hudi. Yang selalu memberi dukungan dan semangat kepadaku sehingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku tercinta Whidda Novika, Ella Amelia Amd.Kep, Anisa Septiani, Dicha Arliani Munandar, Ahmad Rizaldin Zamri, Sulthan Bin Tahir S.H.
9. Teruntuk sahabat Tri Astuti S.Sos, Meiva Ursyida S.H dan Amelia Nafli yang selalu mendukung dan menyemangati sehingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Rekan-rekan seperjuangan Jurusan Siyasah syar'iyah angkatan 2014 khususnya kelas C, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas kebersamaan perjuangan selama ini;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun penulis terima dengan tangan terbuka dan ucapan terima kasih. Namun demikian, penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya Aamiin.

BandarLampung, 2019

Penulis



Kurnia Sulistya Zahra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang	3
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
F. Metode Penelitian.....	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Efektivitas Kinerja ASN	
1. Penyelenggaraan Pelayanan Publik	18
2. Asas-Asas Pelaksanaan Pelayanan Publik	29
3. Evaluasi Dan Pengelolaan Pelaksanaan Pelayanan Publik.....	31
B. Tata Kelola Kepegawaian	
1. Asas-Asas Penyelenggaraan Kebijakan Dan Manajemen ASN	32
2. Prinsip Dan Nilai Dasar Profesi Aparatur Sipil Negara	34
3. Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara.....	36
C. Prinsip-prinsip Fiqhs iyasah dalam ASN	
1. Konsep khilafah (kepemimpinan).....	37
2. Asas perlakuan yang sama (<i>al-muamalah bi-mithl</i>)	39

BAB III PELAKSANAAN PASAL 7 PP NO. 53 TAHUN 2010 di KANTOR REKTORAT UIN RADEN INTAN LAMPUNG

A. Sejarah UIN Raden Intan Lampung	45
B. ASN di Rektorat UIN Raden Intan Lampung	65

C. Pelaksanaan Disiplin ASN di Rektorat UIN Raden Intan Lampung.....	66
D. Penerapan Sanksi Bagi ASN yang Tidak Disiplin di Rektorat UIN Raden Intan Lampung.....	69

BAB IV KEDISIPLINAN ASN DI REKTORAT UIN RADEN INTAN LAMPUNG DALAM TINJAUAN FIQH SIYASAH

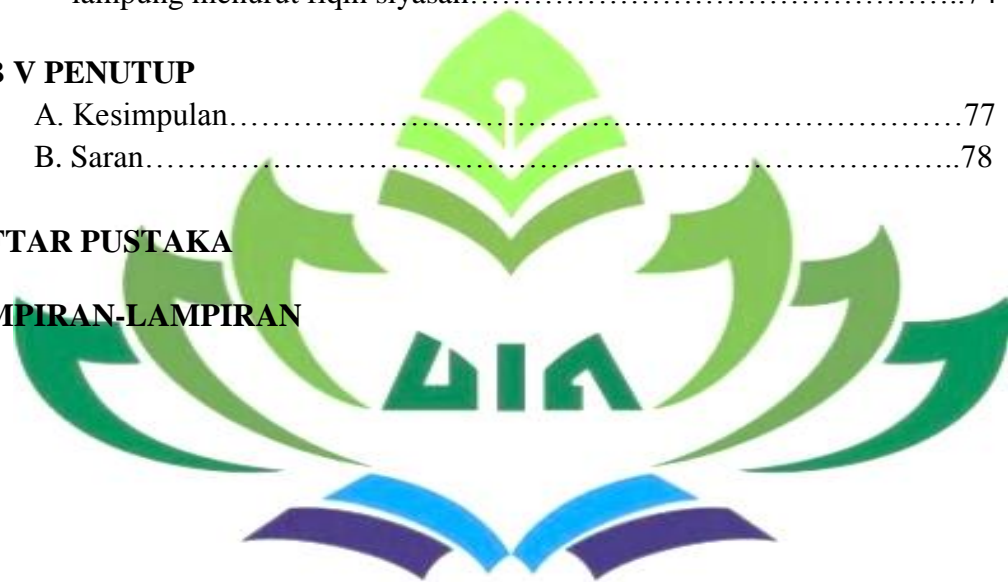
A. Analisis kinerja aparatur sipil negara dalam peran sanksi disiplin di kantor UIN lampung.....	73
B. Kinerja aparatur sipil negara dalam sanksi disiplin di kantor UIN lampung menurut fiqh siyasah.....	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna memperjelas pokok bahasan penulis skripsi ini, maka perlu penjelasan dengan makna atau definisi yang terkandung di dalamnya. Judul skripsi ini adalah **PELAKSANAAN PASAL 7 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG KEDISIPLINAN APARATUR SIPIL NEGARA MENURUT FIQH SIYASAH (Penelitian di Kantor Rektorat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)**. Judul ini terdiri dari beberapa istilah pokok sebagai berikut ;

1. **Kedisiplinan** adalah perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya.²
2. **Aparatur Sipil Negara (disingkat ASN)** sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara perubahan atas Undang-Undang No. 43 tahun 1999 tentang Pegawai Negeri :
 1. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
 2. Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat

² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2008), h. 35.

pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Jadi, Disiplin Aparatur Sipil Negara adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menjauhi larangan yang ditentukan dalam peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada pasal 1 ayat (1).³

3. **Fiqh** secara bahasa terdapat dua makna. Makna pertama adalah al fahmu al mujarrad, yang artinya adalah mengerti secara langsung atau hanya sekedar mengerti saja.⁴
4. **Siyasah** adalah politik diambil dari kata (*saasa*) yang artinya memimpin, memerintah, mengatur, dan melatih sebuah kaum.⁵ Dengan demikian *Fiqh Siyasah* adalah ilmu yang membutuhkan pemahan dan pengarahan yang mendalam dalam aspek hukum Islam dan aturan.

Dari beberapa pembahasan istilah di atas dapat disimpulkan, yang dimaksud judul skripsi ini adalah bagaimana menurut fiqh siyasah terhadap masalah kedisiplinan aparatur Negara atau pegawai negeri sipil yang harus patuh dan taat terhadap peraturan yang ada.

³Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

⁴Muhammad Ibn Manzhur, *Lisanul Arab*, (Madah: Darul Fikri), 1386.

⁵ A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1984), h. 677.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul “Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Fiqh Siyasah (studi kasus di Kantor UIN Raden Intan Lampung)” ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai Mahasiswi UIN Raden Intan Lampung yang menjunjung tinggi Kedisiplinan waktu yang sangat berarti ini ingin mengetahui bagaimana Kedisiplinan staf atau para pegawai menurut Fiqh Siyasah yang ada di kantor Rektorat UIN Raden Intan Lampung.
2. Pokok bahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Siyasah.
3. Belum ada yang memilih judul proposal ini di fakultas syariah dan hukum jurusan siyasah.

C. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana kita ketahui kedudukan dan peran Aparatur Sipil Negara, untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional. Kelancaran penyelenggaraan tugas dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur Negara khususnya Aparatur Sipil Negara. Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Aparatur Sipil Negara yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang 1945.

Kemajuan sebuah Negara bergantung pada program pembanguana di berbagai bidang yang harus terus dilakukan, hal tersebut dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas, ASN sebagai unsur utama sumber daya manusia yang mempunyai peranan terhadap keberhasilan peyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini bahwa ASN menjadi tumpuan dalam pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing⁶. Dengan demikian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan salah satu element penting yang menjadi ujung tombak dari pemerintah, idealnya dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat harus sesuai dengan kaidah *good and clean goverenance* dimana baik semua element termasuk pegawai wajib menjalankan tugas dan fungsinya dengan profesional, baik dan bersih sehingga pelayanan yang didapat oelh masyarakat dapat sesuai dengan kualitas pelayanan yang diharapkan.⁷

Kedisiplinan merupakan fungsi yang terpenting karena semakin baik disiplin karyawan, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat di capainya. Tanpa disiplin yang baik, sulit bagi organisasi mencapai hasil yang optimal.

Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kedisiplinan dapat diartikan bilamana karyawan atau pegawai datang dan pulang tepat waktunya, mengerjakan semua pekerjaannya dengan baik, mematuhi semua peraturan perusahaan atau perkantoran dan norma-norma sosial yang berlaku.

⁶ Dessler Gary, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta : PT. Prenhallindo, 1997), h.329.

⁷<http://jatimprov.go.id/read/profil/satuan-kerja-perangkat-daerah>, (diakses tanggal 30 Oktober 2018, Pukul 20:00 WIB).

Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu organisasi atau instalasi, karena tanpa dukungan disiplin karyawan yang baik, maka sulit perusahaan untuk mewujudkan tujuannya. Jadi, kedisiplinan adalah kunci keberhasilan suatu perusahaan atau perkantoran untuk mencapai suatu tujuan tertentu.⁸

Aparatur Sipil Negara (disingkat ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan. Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁹

Kurang disiplinnya PNS masih sering terlihat kasat mata dalam keseharian. Kedisiplinan PNS terlihat dari masih adanya PNS yang terlambat masuk kerja, pulang lebih awal, berkeliaran di saat jam kerja dan membolos. Disiplin Pegawai Negeri Sipil itu sendiri menurut Peraturan Pemerintah adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati dan dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.¹⁰ Berprofesi sebagai PNS sebagai abdi Negara memang sangatlah nyaman, disiplinnya longgar, setiap bulan menerima gaji, bahkan banyak PNS yang memakan “gaji buta”. Hal ini juga akan

⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Organisasi Dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.172

⁹ <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id>, (diakses Tanggal 27 September 2018, pukul 20:15 WIB).

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

berdampak pada munculnya perilaku PNS yang bisa menyimpang seperti KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).

Pelanggaran disiplin itu sendiri menurut Peraturan Pemerintah adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.¹¹ Faktor penyebab terjadinya ketidakdisiplinan ini karena pembinaan, pengawasan dan sanksi yang dilakukan dan dijatuhkan selama ini tidak berjalan optimal lebih lemah lagi dan cenderung pilih kasih sehingga tidak berwibawa di mata korps pegawai negeri. Hal ini bisa juga menjadi indikasi penilaian kerja di jajaran PNS masih berdasarkan “suka dan tidak suka”, sehingga masih jauh dari harapan profesionalisme.¹²

Mengenai soal sanksi disini saya akan meneliti di Kantor UIN Raden Intan Lampung ada tidaknya sanksi yang diterapkan dan pelanggaran ketidakdisiplinan 3 tahun belakangan ini antara tahun 2015-2017, dan disini juga saya akan menanyakan langsung pada Kepala Bagian Kepegawaian atau Kasubag apakah di Kantor Rektor UIN Raden Intan Lampung sudah menerapkan sanksi-sanksi yang ada mengenai pegawai yang tidak disiplin atau tidak, dan sudah adakah efek jera yang di timbulkan para pegawai atau tidak. Menerapkan sanksi disini sangatlah penting, karena akan membuat efek jera pada pegawai yang lainnya, sehingga pegawai yang mangkir atau tidak disiplin berkurang, dan menambah efektifitas kerja para pegawai yang lainnya.

¹¹*Ibid.*

¹²<https://www.google.co.id/amp/bangka.tribunnews.com/amp/2014/03/33/menegakkan-disiplin-pns>, (diakses Tanggal 28 September 2018, pukul 08:00 WIB).

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 7 disebutkan bahwa tingkat dan jenis hukuman disiplin ada 3 tingkatan, yaitu¹³ :

(1). Hukuman Disiplin Ringan, terdiri dari :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis; dan
- c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.

(2). Hukuman Disiplin Berat, terdiri dari :

- a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
- b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
- c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

(3). Hukuman Disiplin Berat, terdiri dari :

- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c. Pembebasan dari jabatan;
- d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
- e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Didalam PP No. 53 Tahun 2010 juncto PP30 Tahun 1980 Tentang Disiplin PNS, disebutkan beberapa penyebab terjadinya pelanggaran disiplin PNS, yakni : Moral / Mental PNS, Perlakuan Tidak Adil, Kurangnya kesejahteraan,

¹³PP No. 53 Tahun 2010 Pasal 7.

Pelanggaran tidak di tindak tegas, Krisis Keteladanan dan Tidak di pahamiya peraturan disiplin PNS.¹⁴

Apabila PNS tidak disiplin akan dikenakan Hukuman Disiplin yang terdapat pada PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil BAB III tentang Hukuman Disiplin, dan hukuman disiplin pula ada tingkatannya yang terdapat pada Pasal 7, dan terdapat hukuman Ringan, Sedang dan Berat.¹⁵

Dalam hukum Islam kedisiplinan merupakan bagian dari rasa tanggung jawab terhadap sesuatu yang sedang diamanahkan kepada kita, sedangkan amanah sendiri merupakan suatu hal yang wajib hukumnya untuk dilaksanakan dengan baik, sebagaimana firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui” [Al-Anfal : 27].¹⁶

Ibnu Katsir berkata, “Dan khianat mencakup dosa-dosa kecil dan besar yang lazim (yang tidak terkait dengan orang lain) dan muta’addi (yang terkait dengan orang lain). Berkata Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas mengenai tafsir ayat ini, “Dan kalian mengkhianati amanah-amanah kalian”. Amanah adalah ama-amal yang diamanahkn Allah kepada hamba-hamba-Nya, yaitu

¹⁴<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2010/53Tahun2010.htm>, (diakses Tanggal 28 September 2018, pukul 09:00 WIB).

¹⁵Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Kedisiplinan ASN.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan New Cordova*, (Bandung: CV Penerbit Sygma, 2012), h. 180.

faridhah (yang wajib), Allah berfirman : “Janganlah kamu mengkhianati” maksudnya : janganlah kamu merusaknya”. Dan dalam riwayat lain ia berkata, “(Janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul) Ibnu Abbas berkata, “(Yaitu) dengan meninggalkan sunnahnya dan bermaksiat kepadanya”.

Dan firman-Nya.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا
وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh” [Al-Ahzab : 72]¹⁷

Ibnu Katsir berkata setelah menyebutkan pendapat-pendapat mengenai tafsir amanah, diantaranya ketaatan, kewajiban, dan (agama), dan hukum-hukum had, ia berkata, “Dan semua pendapat ini tidak saling bertentangan, bahkan ia sesuai dan kembali kepada satu makna, yaitu *at-taklif* serta menerima perintah dan larangan dengan syaratnya. Dan jika melaksanakan ia mendapat pahala, jika meninggalkannya dihukum, maka manusia menerimanya dengan kelemahan, kejahilan, dan kezalimannya kecuali orang-orang yang diberi taufik oleh Allah, dan hanya kepada Allah tempat meminta pertolongan”.

Kaitannya dengan Hukum Islam atau fiqh siyasah adalah jalanilah tugas, amanah, dan kewajiban dengan baik, bahwasanya Allah mengetahui dan melihat apa-apa saja yang hamba-Nya kerjakan. Menjalani amanah memang sangat susah dan Allah sudah menyebutkan firman-Nya di atas hanya orang-orang yang di beri taufik yang bisa menjalankan amanahnya dengan benar, jika mereka melalaikan tugas, kewajiban atau amanatnya Allah akan

¹⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan New Cordova*, (Bandung: CV Penerbit Sygma, 2012), h.427.

memberikannya hukuman atau balasan dan akan memperhitungkannya di hari akhir sebagai penyesalan di hari kiamat.

Dari latar belakang di atas maka penulis ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut mengenai kedisiplinan ASN menurut Fiqh Siyasah di Kantor Rektorat UIN Raden Intan Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang penulis kemukakan, maka rumusan yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah kedisiplinan dan sanksi ASN sudah melaksanakan dan sudah sesuai dengan Pasal 7 PP 53 Tahun 2010 ?
2. Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap kedisiplinan pegawai ASN ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kedisiplinan dan sanksi pegawai ASN di Kantor Rektorat ?
 - b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap kedisiplinan pegawai ASN ?
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritis : diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai kedisiplinan pegawai ASN/PNS, dapat memperkaya khazanah keilmuan dan wawasan dalam penelitian ilmiah

sebagai wujud dari disiplin ilmu yang dipelajari dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Tata Negara dan Politik (siyasah) dan salah satu dalam mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

- b. Secara praktis : diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pemikiran yang positif bagi penulis dan khususnya bagi pembaca pada umumnya yaitu tentang kedisiplinan pegawai ASN/PNS, memberikan informasi dan masukan pada penelitian berikutnya yang ingin melakukan penelitian ini di bidang ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah merupakan penelitian lapangan (*field research*). Menurut Kartini Kartono, penelitian lapangan yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.¹⁸ Jadi penulis mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang ada di perkantoran dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Adapun objek penelitian lapangan tersebut adalah studi di kantor UIN Raden Intan Lampung.

¹⁸ Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Cet. Ke-VII, (Bandung : Mandar Maju, 2004), h. 34.

b. Sifat penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian *deskriptif*, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.¹⁹ Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, diinterpretasikan, dan kemudian disimpulkan.²⁰

2. Responden

Responden adalah semua orang baik secara individu maupun kolektif yang akan diminta keterangan yang diperlukan oleh pencari data. Bagi seorang peneliti, proses pengumpulan data dari responden baik melalui angket, kuesioner, atau wawancara langsung betul-betul harus teliti. Kemampuan responden sedikit banyak mempengaruhi jawaban atau informasi yang diberikan, terutama kalau pertanyaan menyangkut nama baik daerah atau pernyataan yang bersifat sensitif.²¹ Adapun responden dalam penelitian ini adalah : Pejabat yang berwenang dalam memberikan sanksi kepada ASN yang tidak disiplin yaitu, Kabag/Kasubag Kepegawaian, Kepala Biro, PR II UIN Raden Intan Lampung.

¹⁹Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 7.

²⁰Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, Cetakan Ke 3, 2011), h. 105.

²¹<http://gpengertian.blogspot.com/2012/06/responden-pengertian-contoh-kelebihan.html>, (diakses Tanggal 30 September 2018, pukul 07:00 WIB).

3. Sumber Data

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan²².

Data sekunder yang dikumpulkan menggunakan tiga jenis Bahan Hukum yaitu :

1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari :

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Kedisiplinan ASN;
- b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder Adalah bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli seperti buku-buku literature dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder antara lain Al-

²² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, (Jakarta : Ghalia, 1994), h. 11.

Qur'an, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Majalah, Surat Kabar dan Internet.

b. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*field research*) dengan cara wawancara (*interview*)²³.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena yang diselidiki yang terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung.²⁴

Observasi ini dilaksanakan untuk melihat dari dekat tentang kebenaran yang disampaikan oleh responden jenis observasi yang digunakan adalah jenis observasi partisipan, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi lingkungan sosial kepegawaian. Adapun yang menjadi bahan observasi adalah kedisiplinan ASN atau PNS di Kantor UIN RIL menurut Fiqh Siyasah.

²³ J Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2003), h. 2.

²⁴ Abdulkadir Muhmmad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 8.

b. Metode *Interview* (wawancara)

Metode Interview adalah wawancara bebas terpimpin yaitu pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi.²⁵

Wawancara yang dilakukan penulis untuk memperoleh pemahaman mengenai pandangan atau prespektif seseorang terhadap isu atau tema tertentu, yakni dengan cara tanya jawab secara lisan dan tatap muka langsung kepada orang yang bersangkutan. Wawancara ini dimaksud untuk memperoleh data dalam penelitian. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak berstruktur dengan beberapa orang yang memang berkapasitas dan patut untuk dimintai keterangan mengenai permasalahan yang peneliti ambil, cara ini di gunakan agar lebih mudah mencapai tujuan.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari prncatatan sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya.²⁶

Dokumentasi yang digunakan peneliti terkait dengan pokok masalah yang peneliti ambil. Dokumen bisa berupa data-data dari kepala staf kepegawaian atau staf yang lainnya dengan pokok masalah yang peneliti ambil.

²⁵ Arikunto, Suharsimi dkk, *Penelitian Tindakan Kelas*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), h. 83.

²⁶ Suhar Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta : Rineq Cipta, 2006), h. 231.

5. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang telah terkumpul diolah, dengan cara :

- a. Pemeriksaan Data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengeroksiandata yang telah di kumpulkan karena kemungkinan data yang terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²⁷
- b. Rekrontuksi Data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah di pahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.²⁸

6. Analisis Data

Setelah data diperoleh kemudian dilakukan analisis data. Adapun metode yang digunakan dalam analisa adalah metode Kualitatif yaitu apabila data yang terkumpul sangat sedikit, bersifat monografis atau wujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun kedalam structural klasifikasi), maka analisisnya bersifat Kualitatif, selanjutnya analisa yang di lakukan akan di tarik kesimpulan terakhir guna memberi jawaban terhadap masalah yang berkaitan dengan kedisiplinan ASN menurut Fiqh Siyasah setelah semua data terkumpul, penulis mengambil kesimpulan dari seluruh pembahasan dengan cara berfikir

²⁷ Susiadi AS, *Metodelogi Penelitian*, (Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 115.

²⁸ Amiruddin Dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), h. 107.

induktif yaitu dimulai dari fakta yang bersifat khusus dan kongkrit, ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.²⁹



²⁹Louis Groce Schalk, *Understanding Story, A Primer Of Histirical*, Terjemahan Nugroho, Uu Press, 1995, h. 32.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektifitas Kinerja ASN

1. Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Pada hakikatnya sebuah perusahaan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggannya adalah untuk memperoleh dan mempertahankan laba. Kalangan bisnis harus meyakini bahwa pelanggan adalah sumber keberuntungan sehingga harus diperbanyak. Seperti orang china bilang “koneksi harus diperbanyak, rezky itu akan mengalir.” Atau seperti kata Prof. TS Grewal sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Iqbal *“custumor is profit, everything else is overhead”* kunci utama dari semua ini adalah kepuasan pelanggan. Kalau hal ini dilakukan, hasil seperti angsa bertelur emas setiap hari dan selama-lamanya.³⁰

Dalam suatu lembaga pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat pelayanan publik adalah salah satu unsur penting. Pelayanan dapat diartikan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok masyarakat terhadap suatu kebutuhan baik pada birokrasi pemerintahan ataupun pada lingkungan masyarakat umum.³¹

Moenir mengatakan ”Layanan yang diperlukan manusia pada dasarnya 2 jenis yaitu layanan fisik yang sifatnya pribadi sebagai manusia, dan layanan

³⁰ Mohhammad Iqbal, *Pelayanan Yang Memuaskan*, (Jakarta : Gramedia, 2007), hal. 61.

³¹ Sarinah Mardalena, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta : Penerbit Deepublish, 2017), hal 27.

administratif yang diberikan oleh orang lain selaku anggota organisasi (organisasi massa atau organisasi negara)”.³²

Menurut Stanton sebagaimana yang dikutip oleh Jailani, pelayanan adalah “kegiatan yang tidak jelas namun menyediakan kepuasan konsumen atau pemakai industri, ia tidak terikat pada penjualan suatu produk atau pelayanan yang lainnya”.³³

Sedangkan publik sendiri berasal dari bahasa Inggris *public* yang berarti umum, masyarakat atau negara. Menurut Ibnu Kencana Syafie dkk dalam bukunya arti dari publik itu sendiri adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki.³⁴

M. Ladzi Safroni menyatakan “pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan atau keperluannya menurut peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan”.³⁵

Pengertian umum pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 adalah segala kegiatan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Selanjutnya dinyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik adalah instansi pemerintah. Instansi pemerintah adalah sebuah kolektif meliputi

³² Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), h. 187.

³³ *ibid*, hal. 27.

³⁴ Inu Kencana Syafie dkk, *Ilmu Administrasi Publik*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), h. 17-18.

³⁵ M. Ladzi Safroni, *Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik*, (Jakarta : Aditya Media, 2012), hal. 147.

satuan kerja/satuan organisasi, kementrian, departemen, lembaga pemerintah non-departemen, dan instansi pemerintah lainnya baik pusat maupun daerah termasuk badan usaha milik daerah, dan unit penyelenggaraan pelayanan publik adalah unit kerja pada instansi pemerintah yang secara langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan publik.³⁶

Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Karena itu, pengembangan kinerja pelayanan publik senantiasa menyangkut tiga unsur pokok pelayanan publik yakni: unsur kelembagaan penyelenggara pelayanan, proses pelayanan, serta sumber daya manusia pemberi pelayanan. Pelayanan publik yang prima dapat dinilai dari proses dan produk layanannya. Aspek proses meliputi SDM (Sumber Daya Manusia) aparatur, mekanisme serta sarana dan prasarannya yang digunakan dalam proses. Sedangkan aspek produk layanan menyangkut jenis, kualitas dan kuantitas produk layanan.³⁷

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa pelayanan publik adalah sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat ataupun daerah dalam rangka upaya maupun pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³⁶*Ibid.*

³⁷M. Ladzi Safroni, *Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik*, (Jakarta : Aditya Media, 2012), hal. 51.

Adapun Konsep dasar atau pengertian pelayanan ;

- a. American Marketing Association, seperti dikutip oleh Donald W, Cowell, *kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada hakekatnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu, proses produksinya dan mungkin juga tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik*".³⁸
- b. M.A. Imanto mengatakan bahwa siklus pelayanan adalah *"sebuah rangkaian peristiwa yang dilalui pelanggan sewaktu menikmati atau menerima layanan yang diberikan. Dikatakan bahwa siklus layanan dimulai pada saat konsumen mengadakan kontak pertama kali dengan service delivery system dan dilanjutkan dengan kontak-kontak berikutnya sampai dengan selesai jasa tersebut diberikan"*.³⁹

Dari beberapa pengertian pelayanan dan pelayan publik yang diuraikan tersebut, dalam konteks pemerintah daerah, pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan/atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan.

Dengan demikian, terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama, adalah organisasi pemberi (penyelenggaraan) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah, unsur kedua, adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga,

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid*, h. 51.

adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan). Antara lain:

1. Unsur pertama menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki posisi kuat sebagai (regulator) dan sebagai pemegang monopoli layanan, dan menjadikan Pemda bersikap statis dalam memberikan layanan, karena layanannya dibutuhkan atau diperlukan oleh orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan. Posisi ganda inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab buruknya pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah, karena akan sulit untuk memilah antara kepentingan menjalankan fungsi regulator dan melaksanakan fungsi meningkatkan pelayanan.⁴⁰
2. Unsur kedua, adalah orang, masyarakat atau organisasi yang berkepentingan atau memerlukan layanan, (penerima layanan), pada dasarnya tidak memiliki daya tawar atau tidak dalam posisi yang setara untuk menerima layanan, sehingga tidak memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Posisi inilah yang mendorong terjadinya komunikasi dua arah untuk melakukan KKN dan memperburuk citra pelayanan dengan mewabahnya pungli, dan ironisnya dianggap saling menguntungkan.⁴¹
3. Unsur ketiga, adalah kepuasan pelanggan menerima pelayanan, unsur kepuasan pelanggan menjadi perhatian penyelenggara pelayanan (Pemerintah), untuk menetapkan arah kebijakan pelayanan publik yang

⁴⁰<https://id.m.wikipedia.org/pelayanan-publik/asn>. (diakses tanggal 18 september 2018, pukul 12.30 wib).

⁴¹*Ibid*

berorientasi untuk memuaskan pelanggan dan dilakukan melalui upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja manajemen pemerintah daerah.⁴²

Dengan demikian, pemerintah daerah dalam menjalani monopoli pelayanan publik, sebagai *regulator* harus mengubah pola pikir dan kerjanya dan di sesuaikan dengan tujuan pemberian otonomi daerah, yaitu memberikan dan meningkatkan pelayanan yang memuaskan masyarakat. Untuk terwujudnya *good governance*, dalam menjalankan pelayanan publik, Pemerintah Daerah juga harus memberikan kesempatan luas kepada warga dan masyarakat, untuk mendapatkan akses pelayanan publik, berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, transparansi, akuntabilitas dan keadilan.

1. Lingkup Penyelenggara Pelayanan Publik

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai perwujudan kedaulatan rakyat pada dasarnya bertujuan meningkatkan harkat dan martabat bangsa, mengamanatkan kewajiban pemerintah untuk memberikan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyatnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Undang-Undang Dasar 45 memberikan perintah, tugas dan wewenang kepada seluruh aparatur Negara melaksanakan amanat untuk mensejahterakan rakyatnya, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, dan perwujudannya adalah pelayanan publik yang baik. Dengan demikian, amanat Undang Undang Dasar 1945, menjadi penjurur atau pedoman bagi

⁴²*Ibid*

seluruh aparatur Negara/pemerintahan disemua susunan pemerintahan, sesuai dengan tugas dan fungsinya wajib menyelenggarakan; pemerintahan yang baik, pembangunan dan pelayanan kepada warga dan rakyatnya, untuk tujuan kesejahteraan rakyatnya.⁴³

- b. Penyelenggaraan pelayanan publik, meliputi seluruh penyelenggaraan Negara dan pemerintahan sesuai dengan fungsi dan bidang tugasnya, lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan publik, dan masyarakat atau lembaga private yang menyelenggarakan pelayanan (*private goods*), serta Badan Usaha/Badan Hukum yang bekerjasama dan/atau diberi tugas melaksanakan fungsi pelayanan publik.⁴⁴

2. Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik, dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik, yaitu; penyelenggara Negara/Pemerintah, penyelenggara perekonomian dan pembangunan, lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah, badan usaha/badan hukum yang diberi wewenang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik, badan usaha/badan hukum yang berkerjasama dan/atau dikontak untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik. Dan masyarakat umum atau swasta yang melaksanakan sebagian tugas dan

⁴³Moenir AS. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), h. 200.

⁴⁴*Ibid.* h. 200.

fungsi pelayanan publik yang tidak mampu disediakan oleh pemerintah/pemerintah daerah.

3. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Sepuluh prinsip pelayanan umum diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, kesepuluh prinsip tersebut adalah sebagai berikut;

a. Kesederhanaan;

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan;

b. Kejelasan;

- 1) Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik;
- 2) Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik;
- 3) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.

c. Kepastian Waktu;

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

d. Akurasi;

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.

e. Keamanan;

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

f. Tanggung Jawab;

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

g. Kelengkapan sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika.

h. Kemudahan Akses;

Tempat dan lokasi sarana prasarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informasi.

i. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan;

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

j. Kenyamanan;

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapih, lingkungan yang indah dan sehat, serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lainnya.

Untuk merealisasikan kesepuluh prinsip pelayanan umum tersebut tidak mudah, karena terkait dengan kompleksnya penyelenggaraan umum pelayanan umum, banyak faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja pelayanan yang optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan umum mencakup; Peraturan Perundang-undangan; mekanisme dan prosedur penyelenggaraan pelayanan umum; sarana prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan; kelembagaan dan sumber pendanaan untuk kegiatan operasional pelayanan umum, dan yang paling menentukan adalah komitmen top pimpinan daerah.

Upaya meningkatkan kinerja pelayanan umum akan mendapat hambatan, manakala kita tidak memahami masalah-masalah yang ada pada masing-masing faktor yang mempengaruhi tersebut, oleh karena itu diperlukan kemampuan untuk memadukan dan mengintegrasikan masing-masing faktor tersebut.

Penyelenggaraan pelayanan publik, dilakukan oleh penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu; penyelenggara Negara/pemerintah, penyelenggara perekonomian dan pembangunan, lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah, badan usaha/badan hukum yang diberi wewenang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik, badan usaha/badan hukum yang bekerjasama dan/atau dikontrak untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik. Dan masyarakat umum atau swasta yang melaksanakan

sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik yang tidak mampu ditangani/dikelola oleh pemerintah/pemerintah daerah.⁴⁵

Pasal (1) undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik mengatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan ayat (2) mengatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggaraan adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik.

Unsur-unsur pelayanan publik tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya karena keempatnya akan membentuk proses kegiatan. Keempat unsur tersebut yakni⁴⁶:

1. Tugas layanan, dalam pelayanan umum pemerintah harus memberikan pelayanan sesuai dengan tugas yang diterima untuk melayani semua kepentingan masyarakat.
2. Sistem atau prosedur layanan yaitu dalam pelayanan umum perlu adanya sistem informasi, prosedur dan metode yang mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan.

⁴⁵<http://nanangnugraha4.blogspot.com/penyelenggaraan-pelayanan-publik.html?m=1>. (diakses tanggal 18 september 2018. Pukul 09.50 wib).

⁴⁶Moenir AS. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, (jakarta : Bumi Aksara, 2008), h. 186.

3. Kegiatan pelayanan dalam pelayanan umum, kegiatan yang ditunjukan kepada masyarakat harus bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan tanpa adanya diskriminasi.
4. Pelaksana pelayanan pemerintah sebagai pelexaksana pelayanan semaksimal mungkin mengatur dan merencanakan program secara matang agar proses pelayanan akan menghasilkan struktur pelayanan yang mudah, cepat, tidak berbelit belit dan mudah dipahami masyarakat.

Pada dasarnya penyelenggaraan pelayanan publik ini dilaksanakan oleh penyelenggara negara atau pemerintah, lembaga independen yang dibentuk pemerintah, penyelenggara perekonomian dan pembangunan, badan usaha atau badan hukum yang di beri wewenang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik dan masyarakat umum atau swasta yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik yang tidak mampu ditangani atau dikelola pemerintah.

2. Asas-asas Pelaksanaan Pelayanan Publik

Asas pelayanan publik meliputi :

a. Transparasi

Bersifat terbuka, mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah di mengerti.

b. Akuntabilitas

Dapat di pertannggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

d. Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

e. Kesamaan Hak

Tidak diskriminatif, tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Asas-asas pelaksana pelayanan publik dijabarkan secara rinci didalam penjelasan pasal (4) undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, sebagai berikut:

- a) pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.
- b) Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
- c) Pemebrian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

- d) Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
- e) Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
- f) Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
- g) Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.
- h) Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
- i) Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
- k) Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
- l) Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau.

3. Evaluasi Dan Pengelolaan Pelaksanaan Pelayanan Publik

Pasal 10 ayat (1) undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik mengatakan bahwa penyelenggara berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana dilingkungan organisasi secara berkala dan berkelanjutan. Dalam penjelasan pasal 10 ayat (1) secara berkala dan berkelanjutan merupakan priode yang dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan, 6

(enam) bulan, 12 (dua belas) bulan, atau 24 (dua puluh empat) bulan sekali yang diatur sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

Pedoman evaluasi kinerja pelayanan publik tersebut menjadi acuan bagi pembina/penanggung jawab penyelenggara pelayanan publik guna memperbaiki, dan menyempurnakan layanan yang sesuai dengan aspek-aspek penyelenggaraan pelayanan publik.

Tujuan dilakukan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik, yaitu :

- a. Mengetahui capaian kinerja penyelenggara pelayanan publik;
- b. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan hasil evaluasi.
- c. Menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan.

B. Tata Kelola Kepegawaian

1. Asas-asas Penyelenggaraan Kebijakan Dan Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mengatakan bahwa Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas.

Asas-asas tersebut dijelaskan lebih rinci dalam penjelasan Pasal 2 yaitu sebagai berikut :

- a. Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN, mengutamakan landasan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.

- b. Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Yang dimaksud dengan “asas proporsionalitas” adalah mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai ASN.
- d. Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah pengelolaan pegawai ASN didasarkan pada satu sistem pengelolaan yang terpadu secara nasional.
- e. Yang dimaksud dengan “asas delegasi” adalah bahwa sebagian kewenangan pengelolaan pegawai ASN dapat didelegasikan pelaksanaannya kepada kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan pemerintah daerah.
- f. Yang dimaksud dengan “asas netralitas” adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan manapun.
- g. Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Pegawai ASN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Yang dimaksud dengan “asas efektif dan efisien” adalah bahwa dalam menyelenggarakan Manajemen ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

- i. Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Manajemen ASN bersifat terbuka untuk publik.
- j. Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminatif” adalah dalam penyelenggaraan Manajemen ASN, KASN tidak membedakan perlakuan berdasarkan gender, suku, agama, ras, dan golongan.
- k. Yang dimaksud dengan “asas persatuan dan kesatuan” adalah bahwa Pegawai ASN sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- l. Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan kesetaraan” adalah bahwa pengaturan penyelenggaraan ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN.
- m. Yang dimaksud dengan “asas Kesejahteraan” adalah bahwa penyelenggaraan ASN diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup pegawai ASN.

2. Prinsip dan Nilai Dasar Profesi Aparatur Sipil Negara

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mengatakan bahwa Aparatur Sipil Negara sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut :

- a. Nilai dasar;
- b. Kode etik dan kode perilaku;
- c. Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik;
- d. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- e. Kualifikasi akademik;

- f. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
- g. Profesionalitas jabatan.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negaramengatakan bahwa Nilai Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

- a. Memegang teguh ideologi Pancasila;
- b. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
- c. Mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
- d. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- e. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
- f. Menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
- g. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- h. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik;
- i. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- j. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- k. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- l. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- m. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
- n. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan

- o. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

3. Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mengatakan :

Ayat (1) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana yang dimaksud dalam

Pasal 3 huruf b bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN

Ayat (2) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berisi pengaturan perilaku agar Pegawai Aparatur Sipil Negara :

- a. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
- b. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
- c. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
- d. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
- f. Menjaga kerahasiaan yang mencakup kebijakan negara;

- g. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
- h. Menjaga agar tidak menjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
- i. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
- j. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mencari keuntungan dan manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
- k. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
- l. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN.

C. Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah dalam ASN

1. Konsep Khilafah (Kepemimpinan)

Kepemerintahan yang baik adalah suatu pemerintahan yang mampu menegakan keadilan diantara warganya. Bahkan kepada pihak-pihak yang tidak disukai sekalipun, baik karena perbedaan kepentingan, agama, ataupun partai. Penegasan keadilan didalam sumber-sumber hukum islam sangat banyak sekali.

Kata *khilafah* dalam grametika bahasa Arab merupakan bentuk kata benda verbal yang mensyaratkan adanya subjek atau pelaku yang aktif yang disebut

khalifah. Kata *khalifah* dengan demikian menunjuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang, yaitu seseorang yang disebut *khalifah*. Kata *Khalifat* analog pula dengan kata *Imamat* yang berarti keimanan, kepemimpinan, pemerintahan, dan dengan kata *Imarat* yang berarti keamiran, pemerintahan.⁴⁷

Secara historis institusi khalifah muncul sejak terpilihnya Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah dalam memimpin umat Islam sehari setelah beliau wafat⁴⁸. Khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan dan penerapan hukum-hukum syariah. Hal itu karena Islam telah menjadikan pemerintahan dan kekuasaan sebagai milik umat. Untuk itu diangkatlah seseorang yang melaksanakan pemerintahan sebagai wakil dari umat. Allah telah mewajibkan kepada umat untuk menerapkan seluruh hukum syariah.⁴⁹

Siapa pun yang menelaah dalil-dalil syar'i dengan cermat dan ikhlas akan menyimpulkan bahwa menegakan daulah khilafah hukumnya wajib atas seluruh kaum muslimin. Di antara argumentasi syar'i yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut :

Sebagaimana firman Allah SWT.

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا
أَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنْ

⁴⁷Moh. E. Hasim, *Kamus Istilah Islam*, (Bandung : Penerbit Pusaka, 1987), h. 55.

⁴⁸Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1997), Cet. 3, h. 45.

⁴⁹Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah, (Pemerintahan dan Administrasi)*, penerjemah, Yahya A.R, (Jakarta: Hizbut Tahrir, 2006), Cet. 1, h. 31.

بَعْدَ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ

Artinya : Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang salah bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.⁵⁰ (QS An-Nur : 55)

Sebagaimana firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ ۖ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasull-Nya, dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasull (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁵¹ (QS An-Nisa : 59)

2. Asas Perlakuan Yang Sama (al-adl, al-musawah)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan sosial didefinisikan sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang

⁵⁰Departemen Agama Republik Indonesia. *Op.Cit.* h. 553.

⁵¹Departemen Agama Republik Indonesia. *Op.Cit.* h. 128.

benar, berpegang kepada kebenaran⁵². Secara etimologis, dalam kamus *Al-Munawwir*, *al'adl* berarti perkara yang tengah-tengah.⁵³

Keadilan merupakan inti tugas suci (risalah) para Nabi. Dijelaskan, bahwa di dalam Al-Qur'an, masalah keadilan disebutkan dalam berbagai konteks. Kata adil mempunyai beragam terminologi dalam bahasa Arab, seperti *adl*, *qist*, dan *wast*, juga kata mizan yang pandangannya dalam bahasa Inggris ialah, *just* atau *justice*.

Dengan demikian, al-adl berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.

Prinsip ini merupakan prinsip utama dalam pemerintahan yang baik itu dalam konteks hukum atau dalam rangka membangun pemerataan sumber-sumber ekonomi-politik. Prinsip moral ini bersikap tegas pada anti kolusi dan nepotis. Arti pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat-Nya, antara lain :

Sebagaimana firman Allah Swt.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠﴾

Artinya : *sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan*

⁵² Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), h. 8.

⁵³ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta : Pustaka Progresif, 1997), h. 906.

*keji, kemungkarannya dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*⁵⁴. (QS An-Nahl : 90)

Tugas penguasa baik di bidang eksekutif, yudikatif maupun legislatif adalah melaksanakan *amanah* Allah. *Amanah* dimaksudkan berkaitan dengan banyak hal, salah satu di antaranya adalah perlakuan *adil*. Keadilan yang dituntut ini bukan hanya terhadap kelompok golongan, atau kaum muslim saja, tetapi mencakup seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menyangkut hal ini amat banyak, salah satu diantaranya berupa teguran kepada Nabi SAW, yang hampir menyalahkan orang Yahudi karena terpengaruh oleh pembelaan keluarga seorang pencuri. Dalam konteks inilah turun firman Allah :

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ١٠٥

Artinya : *sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat*⁵⁵⁵⁶. (QS An-Nisa : 105)

Berdasarkan ayat tersebut , dituntut kepada pemimpin agar berhati-hati dalam memutuskan suatu perkara, jangan sampai berat sebelah atau tidak sama sehingga membuat kerugian sepihak. Kewajiban-kewajiban tersebut secara ringkas dapat disimpulkan dalam dua hal, yaitu : menunaikan amanah, dan menegakan hukum dengan adil kepada seluruh umat. Mengatur kepentingan

⁵⁴Departemen Agama Republik Indonesia. *Op.Cit.* h. 415.

⁵⁵ Ayat ini dan beberapa ayat berikutnya diturunkan berhubungan dengan pencurian yang dilakukan Thu'mah dan ia Menyembunyikan barang curian itu di rumah seorang Yahudi. Thu'mah tidak mengakui perbuatannya itu malah menuduh bahwa yang mencuri barang itu orang Yahudi. Hal ini diajukan oleh kerabat-kerabat Thu'mah kepada Nabi s.a.w. dan mereka meminta agar Nabi membela Thu'mah dan menghukum orang-orang Yahudi, kendatipun mereka tahu bahwa yang mencuri barang itu ialah Thu'mah, Nabi sendiri hampir-hampir membenarkan tuduhan Thu'mah kerabatnya itu kepada orang Yahudi.

⁵⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.* h.139.

negara tuntutan, sehingga membawa kebaikan bagi individu maupun jama'ah, ke dalam maupun ke luar.

Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kesempurnaan pribadi, standar kesejahteraan masyarakat, dan sekaligus jalan terdekat menuju kebahagiaan ukhrawi. Kebahagiaan duniawi dan ukhrawi akan dapat dicapai bila penguasa dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan menegakkan keadilan.

M. Tholhah Hasan menyimpulkan ada kurang lebih empat macam konsep persamaan dalam islam, yaitu :

- 1) Persamaan dalam hukum; dalam Islam semua orang diperlakukan sama dalam hukum. Nabi SAW, dengan tegas menyatakan : seandainya fatimah anakku mencuri, pasti akan kupotong tangannya.
- 2) Persamaan dalam proses peradilan; Ali bin Abi Thalib pernah menegur Khalifah Umar, karena Khalifah waktu mengadili sengketa antara Ali dengan seseorang Yahudi membedakan cara memanggilnya (kepada Ali dengan nama, gelarnya, yaitu Abu Hasan sedangkan kepada Yahudi dengan nama pribadinya).
- 3) Persamaan dalam pemberian status sosial; Nabi pernah menolak permohonan Abbas dan Abu Dzar dalam suatu jabatan, dan memberikannya kepada orang lain yang bukan dari golongan bangsawan.
- 4) Persamaan dalam ketentuan pembayaran hak harta; Islam mempersamakan cara dan jumlah ketentuan zakat, diat, denda bagi semua orang yang kena wajib bayar, tanpa membedakan status sosialnya dan warna kulitnya.

Prinsip persamaan dalam Islam dapat dipahami antara lain dari Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَى اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Artinya :*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*(Al-Hujarat : 13)⁵⁷

Ayat itu melukiskan bagaimana proses kejadian manusia. Allah telah menciptakannya dari pasangan laki-laki dan wanita. Pasangan yang pertama adalah Adam dan Hawa, kemudian dilanjutkan lagi oleh pasangan-pasangan lainnya melalui suatu pernikahan atau keluarga. Jadi semua manusia melalui proses penciptaan yang “seragam” yang berkaitan dengan ibadah atau muamalah. Persamaan hak tersebut tidak hanya berlaku bagi umat Islam, tetapi juga bagi seluruh agama. Mereka diberi hak untuk memutuskan hukum sesuai dengan ajaran masing-masing, kecuali kalau mereka dengan sukarela meminta keputusan hukum sesuai hukum Islam. Penyamarataan hak di atas berimplikasi kepada keadilan yang seringkali didengungkan Al-Qur'an dalam menetapkan hukum.

Sebagaimana firman Allah SWT.

⁵⁷Departemen Agama Republik Indonesia. h. 847.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya :*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (QS An-Nisa : 58).*⁵⁸

Prinsip persamaan hak dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan hukum Islam. Keduanya harus diwujudkan demi pemeliharaan martabat manusia (*basyariyah insaniyah*).



BAB III

⁵⁸Departemen Agama Republik Indonesia. *Op. Cit.* h.128.

PELAKSANAAN PASAL 7 PP NO. 53 TAHUN 2010 DI KANTOR REKTORAT UIN RADEN INTAN LAMPUNG

A. Sejarah UIN Raden Intan Lampung

Sebelum berdirinya IAIN Raden Intan Bandar Lampung, telah berdiri terlebih dahulu Yayasan Kesejahteraan Islam Lampung (YKIL) pada tahun 1961 di Teluk Betung. Pada tahun 1963, pihak Yayasan Kesejahteraan Islam Lampung mengadakan musyawarah dengan Para Ulama Lampung dan dengan aparat Pemerintah Daerah, yang intinya adalah sarana dan prasarana pendidikan tinggi agama Islam bagi masyarakat. Dari musyawarah tersebut kemudian dihasilkan suatu kesepakatan untuk mendirikan dua Fakultas yaitu Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari'ah.⁵⁹

Pada saat itu sarana dan prasarana pendidikan masih sangat terbatas. Tempat perkuliahan pernah memakai gedung Fakultas Hukum cabang UNSRI di Teluk Betung dan di Masjid Al-Fur'qon Lungsir Teluk Betung. Setelah itu kemudian para inisiator melakukan upaya-upaya agar status kedua fakultas tersebut berubah dari swasta ke negeri. Upaya tersebut membuahkan hasil sehingga pada tanggal 13 Oktober 1964 terbitlah surat Keputusan Menteri Agama R.I. No. 86 /1964 yang isinya perubahan status Fakultas Tarbiyah Yayasan Kesejahteraan Islam Lampung (YKIL) menjadi Instansi Pemerintah (Negeri) yaitu : sebagai cabang Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fattah

⁵⁹<https://www.radenintan.ac.id/sejarah-singkat/>, (diakses Tanggal 20 Desember 2018, pukul 13:00 WIB).

Palembang di Teluk Betung. Sementara Yayasan Kesejahteraan Islam Lampung masih membina Fakultas Syari'ah.⁶⁰

Pada saat itu masih berlaku aturan yang mempersyaratkan berdirinya sebuah al –Jami'ah (IAIN), yaitu sekurang-kurangnya memiliki tiga fakultas, untuk memenuhi persyaratan tersebut maka pada Tahun 1965 Yayasan Kesejahteraan Islam Lampung mendirikan satu fakultas lagi yaitu Fakultas Ushuluddin dengan menunjuk K.H. Zakaria Nawawi sebagai Dekan. Ketiga Fakultas tersebut mengambil tempat di Masjid Al-Fur'qon.⁶¹

Pada Tahun 1966 Pemerintah Daerah menyerahkan Gedung Ex Sekolah Cinadi jalan Kartini untuk kegiatan perkuliahan Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syari'ah dan Ushuluddin dan sejak saat itu kegiatan ketiga Fakultas tersebut dialihkan dari Masjid Al-Fur'qon ke Gedung Ex sekolah Cina di jalan Kartini (Kaliawi).⁶²

Dengan memperhatikan aktivitas Yayasan Kesejahteraan Islam Lampung sudah merasa banyak, maka untuk menyantuni ketiga fakultas tersebut perlu ada yayasan Khusus yang menangani. Kemudian pada tahun 1966 itu juga atas putusan rapat Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Lampung maka terbentuklah Yayasan Perguruan Tinggi Islam (YAPERTI) Lampung. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 187/68 tanggal 26 Oktober 1968 berdirilah satu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di Lampung

⁶⁰*Ibid*

⁶¹*Ibid*

⁶²*Ibid*

dengan Nama " IAIN al-Jami'ah, Al- Islamiyah, Al-Hukumiyah Raden Intan Lampung", dengan Rektor Mukhtar Hasan SH, dan kegiatan perkuliahan pun dilaksanakan di Jl.Kartini Kaliawi Tanjungkarang. Selaku Rektor Pertama, H. Mukhtar Hasan memimpin sampai tahun 1971. Periode kedua, IAIN Raden Intan dipimpin oleh Drs. Ibrahim Bandung dari tahun 1971 s.d. 1973 yang membawahi tiga fakultas yaitu Tarbiyah, Syari'ah dan Ushuluddin dengan mempergunakan kampus di Jl. Kartini Tanjungkarang.⁶³

Periode ketiga, dipimpin oleh Drs. H. Suwarno Achmady, seorang perwira menengah TNI AD yang menjabat dari tahun 1973 s.d. 1978. Pada periode ini IAIN Raden Intan mendapat bantuan Pemda Lampung berupa sebidang tanah seluas 5 Ha. di jalan raya Labuhan Ratu dan selanjutnya kampus pun pindah ke lokasi baru. Adapun kampus Kaliawi di Jalan Kartini dipergunakan untuk TK Raden Intan dan Yayasan SMP Raden Intan. Sejak periode keempat yang dipimpin Drs. H. Muhammad Zein dari tahun 1978 s.d. 1984 IAIN Raden Intan mulai menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) yang sebelumnya menggunakan Sistem Semester non Kredit (1975 – 1982). Pada periode ini pula Pemerintah Daerah Lampung memberikan bantuan tanah kampus seluas + 50 Ha. di Sukarame. Pada periode kelima, IAIN Raden Intan dipimpin oleh Drs. H. Busyairi Majidi, seorang ulama anggota Tim Penyusun Al-Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama, dan dosen IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada periode yang berlangsung dari tahun 1984 s.d. 1989 ini berhasil dibangun empat gedung fakultas berlantai dua untuk Fakultas

⁶³*Ibid*

Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin di Kampus Sukaramé, dan pada tanggal 20 Agustus 1987 kegiatan perkuliahan secara resmi dipindahkan ke kampus baru ini.⁶⁴

Pada periode keenam yang menjadi Rektor adalah Drs. H. Pranoto Tahrir Fatoni seorang birokrat Departemen Agama Jakarta yang menjabat dari tahun 1989 s.d. 1993. Pada periode ini, diadakan penyempurnaan administrasi umum, akademik dan kemahasiswaan, dan terutama administrasi keuangan, serta pembangunan gedung perpustakaan berlantai dua di Sukaramé.⁶⁵

Periode ketujuh, IAIN Raden Intan dipimpin oleh seorang putra daerah Ranau, Drs. H.M. Khozi Badrie yang berlangsung dari tahun 1993 s.d. 1998. Pada masa ini berhasil dibangun ruang perkuliahan Fakultas Syariah beserta gedung perkantornya, sehingga pada periode ini seluruh aktivitas perkuliahan sudah dipindahkan ke kampus Sukaramé.⁶⁶

Pada periode kedelapan, terpilihlah Prof. DR. H.M. Damrah Khair, M.A. untuk memimpin IAIN Raden Intan dari tahun 1997 s.d. 2002. Pada masa ini berhasil dibangun gedung Fakultas Dakwah, gedung rektorat berlantai tiga serta pembangunan Gedung Serba Guna (GSG).⁶⁷

Pada periode kesembilan, IAIN dipimpin oleh Prof. DR. H.S. Noor Chozin Sufri putra Jawa Timur dan seorang tokoh MUI Lampung, yang menjabat sejak

⁶⁴*Ibid*

⁶⁵*Ibid*

⁶⁶*Ibid*

⁶⁷*Ibid*

tahun 2002 s.d. 2006. Masa kepemimpinannya disebut masa kebangkitan IAIN Raden Intan dilihat dari melonjaknya jumlah pendaftar calon mahasiswa, dikembangkannya beberapa jurusan baru dan sarana prasarana kampus, disepakatinya berbagai kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri, juga berhasil dibangun beberapa gedung baru diantaranya gedung Kantor Pascasarjana, gedung perpustakaan berlantai tiga, ruang Dosen Fakultas Tarbiyah dan ruang Dosen Fakultas Syariah. Namun dia berhalangan tetap (meninggal dunia 17 Januari 2006) maka sebagai pengganti sementara adalah Drs. H. Mahmud Yusuf, MA. Hal ini sesuai SK Menteri Agama RI No. B.II/2/0271/2006, Tanggal 8 Maret 2006, sampai pelantikan Rektor baru yang definitif.⁶⁸

Selanjutnya, terbit Surat Keputusan Menteri Agama RI nomor : B.II/3/0847/2006 tanggal 21 Juli 2006 ditetapkan Prof. Dr. H.M. Ridwan Lubis sebagai Pgs. Rektor. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor : 143/M/2006 tanggal 12 Desember 2006 dilantik Prof. Dr.H. Musa Sueb, MA sebagai Rektor IAIN Raden Intan periode 2006 - 2010.⁶⁹

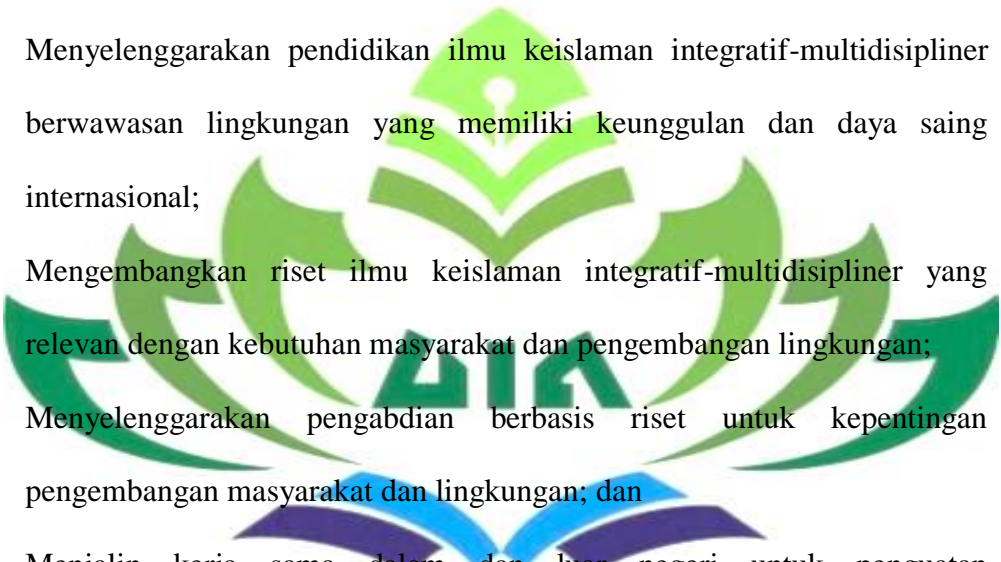
⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ *Ibid*

Visi :

terwujudnya Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagai rujukan Internasional dalam pengembangan ilmu keislaman integratif-multidisipliner berwawasan lingkungan tahun 2035.⁷⁰

Misi :

- 
1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu keislaman integratif-multidisipliner berwawasan lingkungan yang memiliki keunggulan dan daya saing internasional;
 2. Mengembangkan riset ilmu keislaman integratif-multidisipliner yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pengembangan lingkungan;
 3. Menyelenggarakan pengabdian berbasis riset untuk kepentingan pengembangan masyarakat dan lingkungan; dan
 4. Menjalin kerja sama dalam dan luar negeri untuk penguatan kelembagaan.⁷¹

Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan akademik (*ulil ilmi*), intelektualitas (*ulil albab*), spiritualitas (*ulil abshar*), dan integritas iman, takwa, dan akhlaqul karimah (*ulin nuha*), serta kemampuan daya saing dalam rangka menjawab tantangan global;

⁷⁰<https://www.radenintan.ac.id/visi-misi-dan-tujuan/>, diakses tanggal 20 Desember 2018, pukul 13:05 WIB.

⁷¹*Ibid.*

2. Mengembangkan dan/atau menghasilkan kajian, riset, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dijiwai oleh nilai keislaman secara inovatif, obyektif, dan dinamis;
3. Menyebarkan hasil riset dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dijiwai oleh nilai keislaman, serta mengupayakan pemanfaatannya guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional; dan
4. Menghasilkan kerja sama dalam dan luar negeri yang memperkuat pengembangan universitas sebagai rujukan internasional.⁷²

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam tertua dan terbesar di Lampung. Dalam lintas perjalanan sejarahnya, pada April tahun 2017 UIN Raden Intan merupakan hasil transformasi dari IAIN Raden Intan Lampung yang berkembang dalam beberapa fase, yaitu: fase rintisan dan pendirian, fase pembangunan, fase pengembangan, dan fase alih status.⁷³

1. Fase Rintisan dan Pendirian (1961-1973)

Pada mulanya, UIN Raden Intan Lampung ketika bernama IAIN Raden Intan Lampung merupakan lembaga pendidikan tinggi Islam di bawah Yayasan Kesejahteraan Islam Lampung (YKIL). Yayasan ini diketuai oleh Raden Muhammad Sayyid berdiri pada 1961 sebagai yayasan sosial. Yayasan

⁷²*Ibid*

⁷³*Ibid*

ini bertujuan membangun rumah-rumah peribadatan umat Islam dan pendidikan Islam di wilayah Lampung.⁷⁴

Pada 1963, YKIL mengadakan Musyawarah Alim Ulama se-Lampung bertempat di Kota Metro Lampung Tengah dengan agenda menghimpun potensi alim ulama dan mengintegrasikan antara tokoh-tokoh masyarakat dengan aparat pemerintah. Hasil musyawarah antara lain merekomendasikan pendirian lembaga pendidikan tinggi Islam dengan 2 fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari'ah. Aktivitas akademik dan administrasi lembaga ini pada awalnya dipusatkan di Sekretariat Fakultas Hukum UNSRI Cabang Palembang di Lampung (UNILA sekarang), kemudian pindah ke Masjid Lungsir (sekarang Masjid al-Anwar).⁷⁵

Setahun kemudian (1964), seiring dengan berdirinya Lampung sebagai provinsi yang terpisah dari Sumatera Selatan, Fakultas Tarbiyah dinegerikan sebagai cabang Fakultas Tarbiyah UIN Raden Fatah Palembang di bawah kepemimpinan Syaikh Syamsuddin Abdul Mu'thi. Selanjutnya, muncul gagasan untuk membangun PTAIN di Provinsi Lampung, dengan mendirikan Fakultas Ushuludin pada tahun 1965 dengan Dekan KH. Zakariya Nawawi.⁷⁶

Pada 1966, aktivitas akademik ketiga fakultas yang ada dipindahkan ke Kampus Kaliawi. Pada tahun yang sama dalam rangka penegerian, dibentuklah

⁷⁴*Ibid*

⁷⁵*Ibid*

⁷⁶*Ibid*

Yayasan Perguruan Tinggi Islam (Yaperti) Lampung dengan ketua K.H. Zakaria Nawawi.⁷⁷

Seperti bekerja keras membenahi proses administrasi dan menyiapkan proposal penegerian yayasan yang disetujui Menteri Agama dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama RI No. 162 Tahun 1967 tentang pengesahan susunan personalia kepanitiaan penegerian dengan struktur organisasi yang diketuai oleh Gubernur Drs. Zainal Abidin Pagar Alam. Sekretaris panitia adalah Mochtar Hasan, SH yang pada waktu itu menjabat sekretaris daerah Propinsi Lampung, sementara Bendahara dijabat oleh K.H. Zakaria Nawawi sebagai wakil Yaperti. Adapun anggota-anggotanya terdiri dari para dekan fakultas yang ada, tokoh-tokoh masyarakat dan para ulama yang terdiri dari tokoh-tokoh NU, Muhammadiyah dan PSII.⁷⁸

Jerih payah dan usaha YKIL, Yaperti, dan panitia gabungan ini akhirnya menghasilkan SK Menteri Agama Nomor 187 Tahun 1968 tanggal 26 Oktober 1968 tentang Pendirian “IAIN Al-Jami’ah Al-Islamiah Al-Hukumiyah Raden Intan”. Pemberian nama “Raden Intan” didasari pada pertimbangan bahwa di belakang nama Universitas/Institut biasanya diberi label nama kota atau nama pahlawan; dan Raden Intan merupakan pejuang bangsa yang menentang penjajahan Belanda, sekaligus penyiar agama Islam di Lampung.⁷⁹

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ *Ibid*

Pada periode pertama, kepemimpinan institut (Rektor) dijabat oleh Mochtar Hasan S.H., dibantu M. Djuaini Zubair, SH, sebagai Sekretaris Al-Jami'ah (Kepala Biro). Tiga tahun kemudian, jabatan rektor dipegang oleh Drs. Ibrahim Bandung (1971-1973).⁸⁰

2. Fase Pembangunan (1973-1993)

Setelah berakhirnya masa kepemimpinan Rektor ke-2, Institut mulai memasuki fase pembangunan di bawah masa kepemimpinan Rektor ke-3, Letkol. Drs. H. Soewarno Achmady (1973-1978). Fase ini ditandai dengan pemberian hibah tanah seluas 5 hektar di Labuhan Ratu oleh Pemda Dati I Lampung yang kemudian dibangun kampus baru untuk kegiatan administrasi dan akademik. Setelah proses pembangunan.⁸¹

Gedung dan sarana prasarana rampung, aktivitas Institut pun dipindahkan dari Kampus Kaliawi ke Kampus Labuhan Ratu. Hal ini terjadi pada masa kepemimpinan Rektor ke-4, Bapak Drs. Muhammad Zein (1978-1984). Pada masanya juga, Institut mendapat hibah tanah seluas 50 hektar di Sukarame dari Pemda atas dukungan Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwiranegara (putra Lampung).⁸²

Di kawasan yang baru ini didirikan 4 unit gedung perkuliahan berlantai dua yang dipersiapkan untuk kegiatan Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin. Pembangunan ini dimulai pada tahun 1984 di bawah

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ *Ibid*

⁸² *Ibid*

kepemimpinan Drs. H. Busyairi Madjidi sebagai rektor ke-5 (1984 – 1989). Setelah bangunan-bangunan dan fasilitas penunjang dipandang memadai, maka pada tanggal 20 Agustus 1987 kegiatan perkuliahan untuk Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin secara resmi dipindahkan ke kompleks Kampus Sukarame, sedangkan untuk Fakultas Syari'ah, termasuk Rektorat, kegiatannya masih berlangsung di Kampus Labuhan Ratu.⁸³

Pada masa rektor ke-6 yang dijabat Drs. H. Pranoto Tahrir Fatoni (1989-1993), pembangunan fisik terus digalakkan, antara lain dengan membangun gedung Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan. Di samping itu, ia juga melakukan upaya-upaya penataan administrasi umum, terutama administrasi keuangan, serta bidang akademik dan kemahasiswaan.⁸⁴

3. Fase Pengembangan (1993-2015)

Gelombang pengembangan Institut mulai dilakukan secara intensif pada masa kepemimpinan rektor ketujuh Drs. H.M. Khozi Badrie (1993-1997), ditandai dengan peresmian Fakultas Dakwah yang telah dirintis sejak tahun 1990 berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 397 tahun 1993, sehingga jumlah Fakultas yang ada di lingkungan Institut menjadi empat sebagaimana sekarang ini.⁸⁵

Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, MA. (1998-2002) yang menjabat rektor ke-8 melanjutkan upaya pengembangan akademik ini antara lain dimulai dengan

⁸³ *Ibid*

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ *Ibid*

pemindahan seluruh kegiatan Rektorat yang semula berpusat di Kampus Labuhan ke Kampus Sukarame, sekaligus menandai perpindahan secara resmi kegiatan akademik Institut ke Kampus Sukarame. Ia juga mengupayakan pembukaan Program S-2 dan Fakultas Adab. Namun sayang, karena peminat bidang studi untuk Fakultas Adab sangat minim, maka kegiatan Fakultas ini dihentikan. Adapun program S2 terus survive diawali dengan pembahasan dalam sidang senat IAIN (sekarang UIN) Raden Intan tanggal 17 Nopember 1999, yang menyetujui untuk membuka Program Pascasarjana (S2) dan kemudian diterbitkan Surat Keputusan Rektor nomor 222 tahun 1999 tanggal 4 Desember 1999 tentang persiapan pendirian Program Pascasarjana (S2) IAIN Raden Intan Bandar Lampung. Surat Keputusan Rektor tersebut dikukuhkan oleh Gubernur Lampung, Ketua DPRD, Rektor UNILA dan Ormas Islam Provinsi Lampung sebagai dukungan untuk berdirinya Program Pascasarjana IAIN Raden Intan. Pada tahun 2001 Program Pascasarjana IAIN (sekarang UIN) Raden Intan mulai beroperasi dengan jumlah mahasiswa awal sebanyak 52 orang. Setahun kemudian, PPs berhasil mendapat izin operasional berdasarkan SK. Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2002, tepatnya pada masa kepemimpinan Rektor ke-9, Prof. Dr. H.S. Noor Chozin Sufri (2002-2006). Pada masa ini dirintisnya pesantren mahasiswa (ma'had 'aly) dan dibangunnya beberapa gedung baru yaitu kantor Pascasarjana, gedung perpustakaan lantai tiga, ruang dosen Fakultas Tarbiyah dan ruang dosen Fakultas Syari'ah. Pada

masa ini juga dilakukan penguatan sarana dan prasarana, serta pengembangan program studi baru.⁸⁶

Pengembangan dilanjutkan oleh rektor ke-10, Prof. DR. KH. Musa Sueb, MA. (2006-2010) dengan kebijakan peningkatan mutu akademik mahasiswa dan dosen, termasuk di dalamnya pembinaan dan pengembangan akademik bahasa asing, dan pembinaan Pesantren Mahasiswa Ma'had al-Jami'ah di lingkungan kampus. Pengembangan prodi-prodi baru pada program S1 dan S2 juga dilakukan, di antaranya: Prodi Tadris Matematika, Prodi Tadris Bahasa Inggris, Prodi Tadris Biologi, Prodi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal (PGRA), pada Fakultas Tarbiyah, Prodi Ekonomi Islam pada Fakultas Syari'ah, Prodi Pemikiran dan Politik Islam pada Fakultas Ushuluddin, dan Prodi Perdata Syari'ah pada Program Pascasarjana (PPs). Musa juga mendorong pemberdayaan unit-unit pelaksana teknis dan lembaga penunjang akademik antara lain Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM), Lembaga Penelitian (LEMLIT), Pusat Pembinaan Bahasa (PUSBINSA) dan Pusat Penjamin Mutu Pendidikan (P2MP), di samping pengembangan jaringan kerjasama dengan berbagai lembaga. Pada akhir masa jabatannya, Institut ditetapkan sebagai salah satu instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) secara penuh berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 277/KMK.05/2010 tanggal 5 Juli 2010.⁸⁷

⁸⁶*Ibid*

⁸⁷*Ibid*

Laju pengembangan kampus ke arah kemajuan terus digalakkan oleh rektor ke-11 yang dijabat Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag (2010-sekarang) dengan motto: Semakin Unggul dan Kompetitif. Berbagai usaha pengembangan kelembagaan dan peningkatan kualitas SDM terus digalakkan, baik secara fisik maupun akademik. Sejumlah gedung administrasi dan sarana akademik direnovasi dan dibangun untuk memberikan layanan prima bagi mahasiswa. Fasilitas-fasilitas penunjang pembelajaran pun terus dibenahi dan dibangun, antara lain: hotspot, laboratorium, hingga lapangan olahraga. Di bawah kepemimpinannya, sejumlah prestasi mulai diukir pada level nasional. Tahun 2011, IAIN (sekarang UIN) Raden Intan Lampung menduduki peringkat pertama se-wilayah Sumatera dan ketiga nasional untuk SPMB-PTAIN 2011. Tahun yang sama, masuk peringkat sepuluh besar PTAIN dari segi penyerapan anggaran.⁸⁸

Terhitung November 2011, IAIN (sekarang UIN) Raden Intan memiliki jurnal ilmiah terakreditasi nasional, yaitu ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman, Jurnal Al-‘Adalah, dan Jurnal Kalam. Dan awal tahun 2012, Program Pascasarjana membuka Program Doktor dengan Konsentrasi Hukum Islam dan Manajemen Pendidikan Islam. Dan masih banyak lagi kemajuan yang dicapai dan terus diupayakan menuju visi sebagai perguruan tinggi Islam yang unggul dan kompetitif.⁸⁹

⁸⁸ *Ibid*

⁸⁹ *Ibid*

Selanjutnya melalui Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 1457 Tahun 2014 tanggal 14 Maret 2014 diberikan tambahan 4 izin penyelenggaraan program magister (S2) yaitu: Ekonomi Syari'ah, Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Filsafat Agama, dan Manajemen Pendidikan Islam. Hingga saat ini tahun 2017 Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung menyelenggarakan 8 program studi Magister (S2) dan 3 program Studi Doktor (S3).⁹⁰

4. Fase Alih Status (2015-2017)

Sejak tahun 2014, tepatnya bulan Mei 2014 telah selesai penyusunan proposal transformasi IAIN Raden Intan Lampung menjadi UIN Raden Intan Lampung. Pada tahun 2015 Menteri Agama, melakukan studi kelayakan dengan hadirnya Direktur Jenderal Pendidikan Islam ke kampus UIN Raden Intan Lampung. Melalui perjuangan sungguh-sungguh di bawah kepemimpinan Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag selaku Rektor, akhirnya pada tahun 2016 mendapatkan persetujuan/izin prinsip dari Presiden Republik Indonesia bahwa IAIN Raden Intan Lampung menjadi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan motto *Intelectuality, Spirituality, dan Integrity*.⁹¹

Tahun 2017 menjadi awal perubahan arah pengembangan pendidikan tinggi di UIN Raden Intan Lampung dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2017 tanggal 7 April 2017, yang juga mempengaruhi arah pengembangan UIN Raden Intan Lampung. Pada bulan April 2017, Peraturan

⁹⁰*Ibid*

⁹¹*Ibid*

Presiden tentang Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung diundangkan, sehingga sejak 2017 diresmikan menjadi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang disingkat **UIN RI Lampung** dengan pengembangan beberapa fakultas dan program studi bidang sains dan teknologi.⁹²

Daftar Rektor IAIN Raden Intan :

1. H. Mukhtar Hasan (1968-1971)
2. Drs. Ibrahim Bandung (1971-1973)
3. Drs. H. Suwarno Achmady (1973-1978)
4. Drs. H. Muhammad Zein (1978-1984)
5. Drs. H. Busyairi Majidi (1984-1989)
6. Drs. H. Pranoto Tahrir Fatoni (1989-1993)
7. Drs. H.M. Ghozi Badrie (1993-1998)
8. Prof. DR. H.M. Damrah Khair, M.A.(1998-2002)
9. Prof. DR. H.S. Noor Chozin Sufri (2002-2006) (meninggal 17 Januari 2006)
10. Drs. H. Mahmud Yusuf, MA. (Pengganti sementara) s.d. 21 Juli 2006
11. Prof. Dr. H.M. Ridwan Lubis (Pelaksana tugas s.d. 12 Desember 2006)
12. Prof. Dr.H. Musa Sueb, MA (2006 - 2010)
13. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag (2011-2015)
14. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag (2015-2019), periode kedua.

⁹²*Ibid*

1. Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan memiliki sepuluh jurusan/program Studi yaitu :

- 
- a. Program Studi Pendidikan Agama Islam (S.Pd)
 - b. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (S.Pd)
 - c. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (S.Pd)
 - d. Program Studi Bimbingan & Konseling (S.Pd)
 - e. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S.Pd)
 - f. Program Studi Pendidikan Matematika (S.Pd)
 - g. Program Studi Pendidikan Biologi (S.Pd)
 - h. Program Studi Pendidikan Fisika (S.Pd)
 - i. Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini (S.Pd)
 - j. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah /PGSD (S.Pd)

2. Fakultas Ushuluddin dan Study Agama

Fakultas Ushuluddin memiliki tujuh jurusan/program Studi sebagai berikut :

- a. Program Study Aqidah dan Filsafat Islam
- b. Program Study Ilmu Alquran dan Tafsir
- c. Program Study Pemikiran Politik Islam
- d. Program Study Psikologi Islam
- e. Program Study Sosiologi Islam

- f. Program Study Agama-Agama
- g. Program Study Tasawuf dan Psikoterapy

3. Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum memiliki tiga Jurusan/program Studi yaitu:

- a. Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H)
- b. Program Studi Hukum Tata Negara (S.H)
- c. Program Study Hukum Ekonomi (S.H)

4. Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi

Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi memiliki empat jurusan/program studiyaitu :

- a. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (S.Kom)
- b. Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (S.Sos)
- c. Program Studi Manajemen Dakwah (S.E)
- d. Program Studi Bimbingan Konseling Islam (S.Sos)

5. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI)

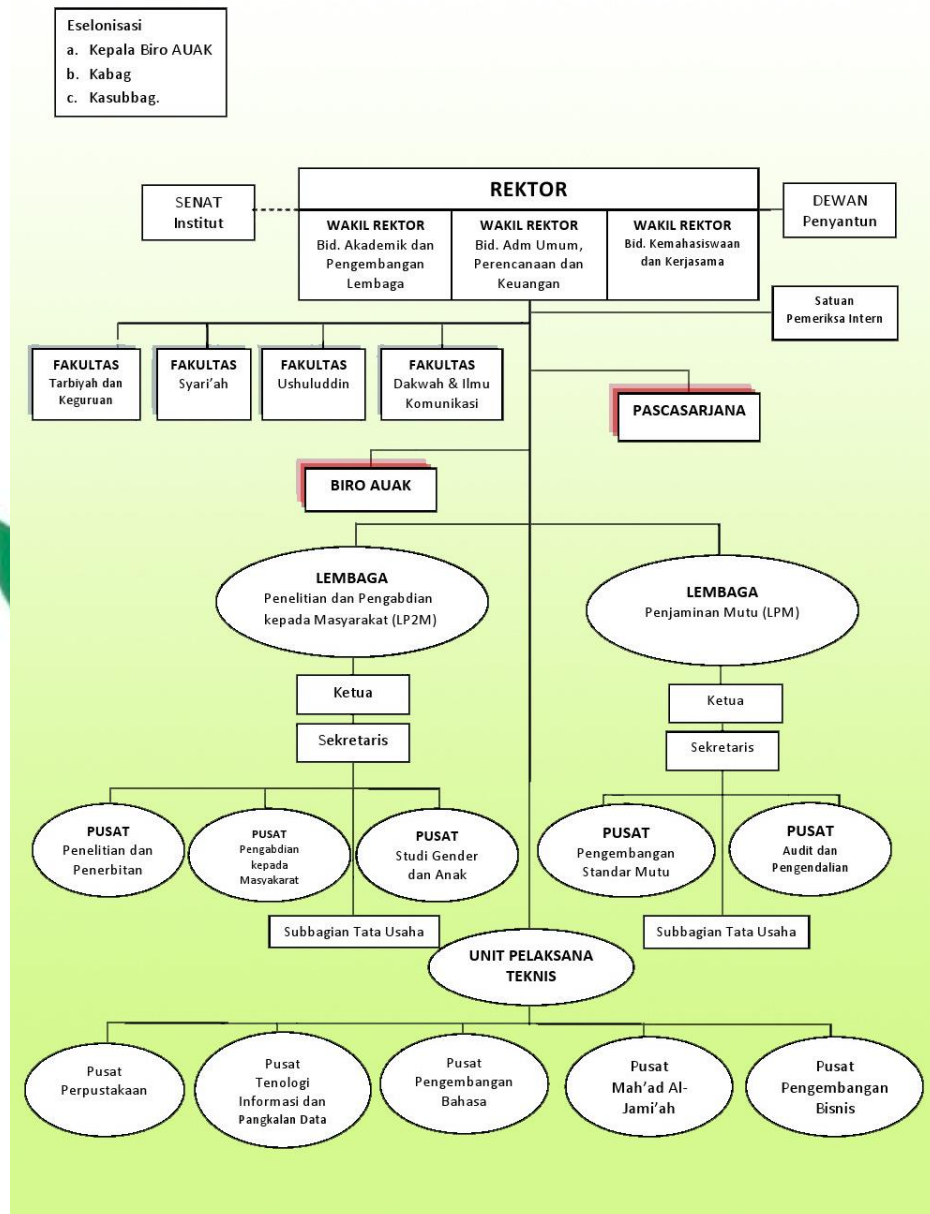
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam memiliki empat jurusan/program studi yaitu :

- a. Program Studi Ekonomi Syariah (S.E)
- b. Program Studi Perbankan Syariah (S.E)
- c. Program Studi Akuntansi Syariah (S.E)
- d. Program Study Manajemen Bisnis Syariah (S.E))⁹³



⁹³*Ibid*

Tabel I
Struktur Organisasi



B. ASN di Rektorat UIN Raden Intan Lampung

Aparatur Sipil Negara (disingkat ASN) sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara perubahan atas Undang-Undang No. 43 tahun 1999 tentang Pegawai Negeri :

1. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Aparatur Sipil Negara (disingkat ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan. Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pegawai Negeri Sipil di Kantor UIN Raden Intan Lampung harus efektif menjalani tugas dan fungsinya sebagai pegawai, efektifitas itu sendiri adalah

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mempunyai arti efek, pengaruh, akibat, atau dapat membawa hasil. Jadi efektivitas dapat diartikan keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas menekankan pada hasil yang dituju atau tepat sasaran. Dalam melakukan tugas pelayanan publik Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melakukan pelayanan publik harus cepat dan tepat. Karena masyarakat awam tentunya akan kesulitan jika dalam pengelolaan sesuatu harus disusahkan dengan persyaratan-persyaratan yang terlalu berbelit-belit dan terkesan tidak masuk akal.⁹⁴

Penyelenggaraan pelayanan publik, menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah pelayanan masyarakat atau abdi negara yang memiliki tanggung jawab terhadap pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Terhadap harapan masyarakat terhadap Aparatur Sipil Negara adalah kinerja andal yang diberikan dalam pelayanan publik.⁹⁵

C. Pelaksanaan Disiplin ASN di Rektorat UIN Raden Intan Lampung

Pada bagian ini dibahas mengenai hasil penelitian tentang pelaksanaan Pasal 7 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara di Kantor Rektorat UIN Raden Intan Lampung. Pelaksanaan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Kantor Rektorat UIN Raden Intan Lampung sudah berjalan

⁹⁴Yulian Prabowo, *Tinjauan Hukum Islam Dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara*, Skripsi, 10 Oktober 2018 Pukul 12.00 Wib.

⁹⁵*Ibid.*

sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang disiplin ASN. Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Kantor UIN Raden Intan Lampung pada dasarnya sudah mematuhi aturan jam kerja yang sudah dibuat dalam aturan kedinasan. Jam kerja yang telah ditetapkan di Kantor Rektorat Uin Raden Intan Lampung yaitu masuk kerja pada pukul 07.30 WIB, waktu istirahat jam 12.00-13.00, lalu pulang kerja pada pukul 16.00 WIB pada hari senin-kamis, sedangkan pada hari jum'at jam masuk kerja pada pukul 07.30-16.30 WIB. Tetapi sejak peraturan itu berlaku tetap masih ada saja Aparatur Sipil Negara yang masih melanggar aturan jam kerja yang telah ditetapkan, bapak Azis Mohadi, S.Ag., M.M mengatakan bahwa sudah ada 3 orang pegawai yang di BAP akibat tidak disiplin kerja. Untuk mengatasi pelanggaran disiplin yang sering terjadi terhadap Aparatur Sipil Negara maka Azis Mohadi, S.Ag., M.M selaku KASUBAG Kepegawaian di Kantor UIN Raden Intan Lampung menerapkan aturan disiplin seperti :

- a. Memberikan sanksi kepada ASN yang melanggar Disiplin.

Dalam hal pemberian sanksi kepada Aparatur Sipil Negara yang melanggar aturan disiplin, pada tahun 2015 ada 1 orang yang dikenakan sanksi, dimana ada 3 tingkatan pelanggaran yaitu :

- 1). Pelanggaran disiplin Ringan

ASN yang tidak diberitahu namanya melakukan pelanggaran terhadap jam kerja yaitu sering datang terlambat ke kantor pada pukul 09.00 WIB yang dimana dalam aturan jam kerja ASN harus masuk kerja pukul 07.30 WIB. Akibat melakukan pelanggaran disiplin ringan ASN

tersebut mendapatkan sanksi berupa teguran lisan dan hukuman oleh atasannya.⁹⁶

2). Pelanggaran Disiplin Sedang.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Azis Mohadi, S.Ag., M.M selaku Kasubag Kepegawaian di Kantor UIN Raden Intan Lampung ASN yang tidak diberi tahu namanya itu sudah melakukan disiplin sedang karena tidak masuk kerja selama berbulan-bulan, pegawai tersebut mendapat sanksi berupa penurunan gaji berkala selama setahun.⁹⁷

3). Pelanggaran Disiplin Berat.

Selain itu ada pula pegawai yang melakukan pelanggaran jabatan disiplin berat yaitu tidak pernah masuk kantor, dan ia dikenakan sanksi disiplin berupa pembebasan dari jabatan sesuai dengan surat keputusan.

b. Melaksanakan Pengawasan Melekat.

Pengawasan melekat bertujuan untuk membuat ASN sadar akan tanggung jawab atas pekerjaannya, pelaksanaan ini dilakukan dengan cara:

3. Pemeriksaan oleh atasan secara langsung terhadap pekerjaan.
4. Pekerjaan dilaksanakan wajib dilaporkan dan dipertanggungjawabkan.
5. Mengevaluasi terhadap tugas-tugas bawahannya.
6. Pemeriksaan secara langsung ketika sedang melakukan pekerjaan.
7. Para pegawai harus izin kepada atasan ketika meninggalkan kantor.
8. Pegawai harus melaksanakan dan menyelesaikan tugas tepat waktu.

⁹⁶Hasil Wawancara, Bp. Azis Mohadi, S.Ag., M.M sebagai Kabag organisasi dan kepegawaian, Tanggal 24 Desember 2018, Pukul 09.30 Wib.

⁹⁷*Ibid.*

Selain itu di Kantor UIN Raden Intan Lampung telah di pasangkan absensi berupa sensor face dan finger print sehingga pegawai tidak bisa memanipulasi data absensi, absensi diadakan dua kali yaitu pada pagi hari yang diadakan pukul 07.30 WIB dan pada pukul 16.00 WIB pada saat jam kantor telah selesai.⁹⁸

Peraturan dikantor UIN Raden Intan Lampung sudah dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan Nomor 53 Tahun 2010 tentang kedisiplinan, telah dilaksanakan dan dijalankan dikantor UIN Raden Intan Lampung sesuai dengan peraturan yang ada dan absensi kepegawaian UIN Raden Intan Lampung.⁹⁹

D. Penerapan Sanksi Bagi ASN Yang Tidak Disiplin di Rektorat UIN Raden Intan Lampung

Sanksi yang telah dibuat di terapkan dan dijalankan oleh kepala kasubag kepegawaian, salah satunya adalah mendapatkan sanksi teguran dan penurunan jabatan kepada pegawai yang melanggar peraturan yang sudah diatur dalam undang-undang Nomor 53 Tahun 2010 pada pasal 7, tentang sanksi kepegawaian yang tidak disiplin. Banyak faktor yang menyebabkan ketidak disiplin pegawai tersebut salah satunya adalah keterlambatan waktu. Karena sanksi yang telah diterapkan bukan hanya pegawai yng hadir, melainkan keterlambatan waktu kisaran 10 menit sampai batas waktu yang ditentukan.¹⁰⁰

⁹⁸*Ibid*

⁹⁹*Ibid*

¹⁰⁰*Ibid*

Proses penjatuhan hukuman disiplin Aparatur Sipil Negara di Kantor UIN Raden Intan Lampung dengan cara sebagai berikut :

a. Pemanggilan

Tata cara pemanggilan bagi pegawai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin di Kantor Rektorat UIN Raden Intan Lampung sudah sesuai dengan apa yang telah diatur dalam pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, pemanggilan dilakukan untuk pemeriksaan bagi pegawai ASN yang telah melakukan pelanggaran disiplin.

Menurut Azis Mohadi, S.Ag., M.M selaku Kasubag Kepegawaian pemanggilan ini berlaku sampai dengan tujuh hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. Apabila ASN tersebut tidak memenuhi panggilan secara tertulis pertama, maka akan dilakukan pemanggilan secara tertulis tahap kedua tujuh hari kerja sejak tanggal seharusnya maka ASN yang melakukan pelanggaran disiplin diperiksa pada pemanggilan pertama.

Namun apabila ASN yang melakukan pelanggaran disiplin tidak juga hadir pada pemanggilan tahap pertama dan kedua maka pejabat yang bersangkutan berhak menjatuhkan hukuman bagi ASN yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan keterangan yang ada tanpa dilakukan tahap pemeriksaan, hal ini sesuai dengan pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

b. Pemeriksaan

Tata cara pemeriksaan ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin diatur dalam pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebelum ASN dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.

Pada saat pemeriksaan ini Kantor Rektorat UIN Raden Intan Lampung telah mengikuti seperti apa yang telah diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 bahwa, pemeriksaan bagi ASN yang melakukan pelanggaran disiplin dilakukan secara tertutup dan hasilnya akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.¹⁰¹

c. Penjatuhan dan penyampaian hukuman disiplin

Dalam melakukan proses pemeriksaan pejabat yang berwenang melakukan serangkaian *cross check* pelanggaran, mendengar pernyataan langsung dari ASN yang melakukan pelanggaran disiplin, mendengar atau meminta keterangan dari pihak lain agar dapat objektif dalam melakukan penjatuhan hukuman. Tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan penjatuhan hukuman adalah agar ASN tersebut tidak mengulangi dan apabila telah memenuhi kategori hukuman berat Asn tersebut dapat di berhentikan.

Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

¹⁰¹ *Ibid*

Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 15, apabila pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada ASN yang melakukan pelanggaran disiplin, maka pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya, apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.



BAB IV
KEDISIPLINAN ASN DI REKTORAT UIN RIL DALAM TINJAUAN
FIQH SIYASAH

A. Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Peran Sanksi Disiplin di Kantor UIN Raden Intan Lampung

Pelaksanaan peran sanksi dalam lingkup Kepegawaian di Kantor UIN Raden Intan Lampung. Disiplin sangat penting untuk perkembangan perkantoran, digunakan terutama untuk memotivasi pegawai agar dapat mendisiplinkan diri dalam melaksanakan pekerjaan, baik secara perorangan maupun kelompok. Dengan adanya kesadaran dalam melaksanakan aturan-aturan kantor yang diwujudkan dalam disiplin yang tinggi, faktor utama untuk mencapai produktifitas kerja yang tinggi adalah pelaksanaan disiplin kerja pegawai. Faktor-faktor pelaksanaan disiplin kerja pegawai di Kantor Rektorat UIN Raden Intan Lampung adalah datang dari diri pegawai itu sendiri misalnya, pegawai datang ke kantor dengan tertib, teratur dan tepat waktu sehingga disiplin kerja dapat berlangsung dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, Azis Mohadi, S.Ag., M.M selaku Kasubag Kepegawaian beliau memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan Aparatur Sipil Negara yang ada di Kantor UIN Raden Intan Lampung. Beliau telah menerapkan apa yang telah diatur oleh Undang-Undang yaitu dengan cara memberikan sanksi kepada Aparatur Sipil Negara yang melanggar disiplin, baik itu pelanggaran disiplin ringan maupun pelanggaran disiplin berat dan

beliau juga menjelaskan bahwasanya Aparatur Sipil Negara yang mematuhi aturan disiplin dan bekerja dengan professional maka ASN tersebut akan mendapatkan penghargaan berupa ucapan atau material. Selain itu dalam meningkatkan disiplin bagi ASN di Kantor Rektorat UIN Raden Intan Lampung Azis Mohadi,S.Ag.,M.M selaku Kasubag Kepegawaian melakukan pengawasan secara langsung terhadap bawahannya agar tugas yang diberikan kepada bawahannya tersebut berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan disiplin Aparatur Sipil Negara di Kantor Rektorat UIN Raden Intan Lampung sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang disiplin pegawai tersebut.

B. Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Sanksi Disiplin di Kantor UIN Raden Intan Lampung Menurut Fiqih Siyasah.

Kinerja Aparatur Sipil Negara sangat berkaitan dengan kaidah *good governance* berorientasikan pada pencapaian tujuan nasional dan pemerintahan yang ideal (efisien dan efektif). Dalam melakukan pencapaian tujuan nasional hakikatnya penyelenggaraan pemerintahan atau pemerintahan ditunjukkan kepada terciptanya fungsi pelayanan publik. Agar suatu tata kelola pemerintahan yang baik terwujud, maka norma-norma yang harus dipenuhi adalah adanya partisipasi, efisiensi, keadilan, dan keadilan hukum, akuntabilitas, transparansi, responsifitas, dan adanya visi.

Untuk dapat mewujudkan *good governance* dalam tiga aspek tersebut diperlukan beberapa nilai dan dari nilai itu dapat ditemukan dari beberapa asas tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam memperhatikan ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW dapat ditemukan beberapa nilai-nilai dasar yang dapat mewujudkan kinerja Aparatur Sipil Negara yang baik, yaitu keadilan, meninggalkan yang tidak bernilai guna, ukhuwah, dan amanah.

Prinsip persamaan hak dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan fiqh siyasah, keduanya harus diwujudkan demi pemeliharaan martabat manusia (basyariah insaniyah). Nilai dasar mengenai keadilan di dalam sumber-sumber Islam banyak sekali, sebagai firman Allah Q.S. An-Nisa: 58.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Dalam kaitan dengan pelayanan masyarakat efisiensi akan terlihat pada ringannya biaya pengurusan dan singkatnya waktu yang di habiskan anggota masyarakat untuk satu pelayanan yang berkualitas, adapun pelayanan yang tidak efisien disebabkan oleh paradigma birokrasi sebagai kekuasaan, bukan sebagai pelayanan.

Pada dasarnya, Al-Qur'an diatas berbicara tentang etika kepemimpinan dalam Islam. Dalam Al-Qur'an ini dijelaskan bahwa etika paling pokok dalam kepemimpinan adalah tanggung jawab. Semua orang yang hidup di muka bumi ini disebut sebagai pemimpin. Karenanya, sebagai pemimpin, mereka memikul tanggung jawab, sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri. Dengan adanya

tanggung jawab dari seorang pemimpin (*ulil amri*) maka diharapkan kesadaran dalam konsep al-ukhuwwah sebagai salah satu nilai dasar syari'ah dapat diturunkan asas responsifitas dalam pemberian pelayanan, responsifitas terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang sepenuhnya dapat dijalankan oleh aparatur sipil negara atau (*tabi'in*).

Kinerja yang baik akan berpengaruh pada produktifitas kerja, nilai dasar fiqh siyasah lainnya adalah amanah didalam konsep amanah itu terdapat suatu asas akuntabilitas, untuk melayani akuntabilitas dan transparansi adalah kriteria yang penting dalam suatu kinerja aparatur sipil negara. Pelaksanaan tinjauan fiqh siyasah terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam peran sanksi dan kedisiplinan di kantor UIN Raden Intan Lampung adalah datang dari aturan yang berdasarkan Undang-Undang dan dipatuhin oleh diri pemimpin (*ulil amri*) dan diri Aparatur Sipil Negara (*tabi'in*) itu sendiri misalnya, Aparatur Sipil Negara datang ke kantor dengan tertib, teratur dan tepat waktu sehingga disiplin kerja, berpakaian rapi di tempat kerja, maka susunan kerja akan terasa nyaman dan rasa percaya diri dan bekerja akan tinggi. Memiliki tanggung jawab yang tinggi, dengan bertanggung jawab terhadap segala tugasnya menunjukkan kinerja aparatur sipil negara yang baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Rektorat UIN Raden Intan Lampung telah diimplementasikan sejak peraturan tersebut diberlakukan.

Namun pada kenyataannya peraturan tersebut belum optimal dilaksanakan karena masih ada beberapa Aparatur Sipil Negara di Kantor Rektorat UIN Raden Intan Lampung yang masih melakukan pelanggaran disiplin. ASN di Lingkungan Kepegawaian Kantor Rektorat UIN Raden Intan Lampung memiliki peran besar dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya dalam meningkatkan disiplin pegawai terhadap jam kerja. Kurang maksimalnya sanksi yang diberikan pegawai dan kurang sadarnya pegawai dalam sanksi yang diberikan tersebut, sehingga kepala Kasubag Di Kantor UIN Raden Intan Lampung memberikan toleransi dan sanksi Ringan Kepada pegawai ASN tersebut.

2. Tinjauan hukum Islam dalam mewujudkan implementasi disiplin Aparatur Sipil Negara di Kantor Rektorat UIN Raden Intan Lampung sudah berjalan dengan baik, terbukti dengan adanya penerapan aturan disiplin sesuai dengan undang-undang yang berlaku, aparatur sipil negara (tabi''in) yang melanggar aturan disiplin sudah diberikan sanksi

sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan, dan Kasubag (ulil amri) sudah bersikap amanah dan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dengan melakukan pengawasan secara melekat dan reward yang diberikan terhadap ASN yang mematuhi aturan disiplin.

B. Saran

1. Kasubag di Kantor Rektorat UIN Raden Intan Lampung perlu melakukan pengawasan intensif terhadap para bawahannya untuk mentaati ketentuan kerja, dimana pada saat yang sama pimpinan juga harus mentaati ketentuan kerja terkecuali dengan alasan tertentu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keteladanan pimpinan dalam melaksanakan disiplin jam kerja terhadap para bawahan.
2. Sebaiknya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ini disosialisasikan untuk pembangunan ASN yang diarahkan untuk menciptakan ASN yang lebih efisien, bersih dan berwibawa serta mampu mengimplementasikan seluruh tugas umum dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.
3. Sebaiknya ada pembinaan yang rutin untuk ASN di Kantor Rektorat UIN Raden Intan Lampung dalam upaya peningkatan kesadaran kedisiplinan sebab dengan melakukan pembinaan diharapkan dapat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku para pegawai. Dan pembinaan ini dilakukan dengan serius karena untuk membangun ASN yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, *Organisasi Dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rinea Cipta, 2009.
- Abdulkadir Muhmmad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta : Pustaka Progresif, 1997.
- Amiruddin Dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Balai Pustaka, 2006.
- Arikunto, Suharsimi dkk, *Penelitian Tindakan Kelas*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008.
- A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progresif, 1984.
- Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta : Pustaka Progresif, 1997.
- Departemen Agama Republik Indonesia.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2002.
- Dessler Gary, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : PT. Prenhallindo, 1997.
- Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah, (Pemerintahan dan Administrasi)*, penerjemah, Yahya A.R, Jakarta: Hizbut Tahrir, 2006.
- Inu Kencana Syafie dkk, *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta : Bumi Aksara, 1999.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. Ke-VII, Bandung : Mandar Maju, 2004.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan New Cordova*, Bandung: CV Penerbit Sygma, 2012.
- Louis Groce Schalk, *Understanding Story, A Primer Of Histirical*, Terjemahan Nugroho, Uu Press, 1995.
- M. Ladzi Safroni, *Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta : Aditya Media, 2012.

Moenir AS. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta : Bumi Aksara, 2008.

Mohammad Iqbal, *Pelayanan Yang Memuaskan*, Jakarta : Gramedia, 2007.

Moh. E. Hasim, *Kamus Istilah Islam*, Bandung : Penerbit Pusaka, 1987.

Muhammad Ibn Manzhur, *Lisanul Arab*, Madah: Darul Fikri, 1386.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Kedisiplinan ASN.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, (Jakarta : Ghalia, 1994), h. 11.

Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Sarinah Mardalena, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta : Penerbit Deepublish, 2017.

Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta : Rajawali Pers, 1997.

Suhar Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* , Jakarta : Rinec Cipta, 2006.

Susiadi AS, *Metodelogi Penelitian*, Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Yulian Prabowo, *Tinjauan Hukum Islam Dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara*, Skripsi.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafik Grafika, Cetakan Ke 3, 2011.

<http://jatimprov.go.id/read/profil/satuan-kerja-perangkat-daerah>, (diakses tanggal 30 Oktober 2018, Pukul 20:00 WIB).

<https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id>, (diakses Tanggal 27 September 2018, pukul 20:15 WIB).

<https://www.google.co.id/amp/bangka.tribunnews.com/amp/2014/03/33/mene-gakkan-disiplin-pns>, (diakses Tanggal 28 September 2018, pukul 08:00 WIB).

<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2010/53Tahun2010.htm>, (diakses Tanggal 28 September 2018, pukul 09:00 WIB).

<http://gpengertian.blogspot.com/2012/06/responden-pengertian-contoh-kelebihan.html>, (diakses Tanggal 30 September 2018, pukul 07:00 WIB).

<https://id.m.wikipedia.org/pelayanan-publik/asn>. (diakses tanggal 18 september 2018, pukul 12.30 wib).

<http://nanangnugraha4.blogspot.com/penyelenggaraan-pelayanan-publik.html?m=1>. (diakses tanggal 18 september 2018. Pukul 09.50 wib).

<https://www.radenintan.ac.id/sejarah-singkat/> , (diakses Tanggal 20 Desember 2018, pukul 13:00 WIB).

Hasil wawancara,Bp.Azis Mohadi,S.Ag.,M.M sebagai Kabag organisasi dan kepegawaian,Tanggal 24 Desember 2018,Pukul 09.30 Wib.

